

**ANALISIS PENGARUH DPK, NPL, LDR, dan INFLASI
TERHADAP PENYALURAN KREDIT UMKM BANK
PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) - SI
PERIODE 2008-2011**



SKRIPSI

**Karya Tulis Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Manajemen**

Disusun Oleh:

DARA PUSPITA NADYA PUTRI

NIM: 1M.07.1108

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
BANK BPD JATENG
SEMARANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGARUH DPK, NPL, LDR, dan INFLASI
TERHADAP PENYALURAN KREDIT UMKM BANK
PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) PERIODE 2008-20011**

Disusun Oleh :
DARA PUSPITA NADYA PUTRI
NIM : 1M.07.1108

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
STIE Bank BPD Jateng

Semarang, Mei 2012

Pembimbing I


Djoko Santosa, SE, MM
NIDN: 0614045201

Pembimbing II


Muliawan Hamdani, SE, MM
NIDN: 0625107001

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGARUH DPK, NPL, LDR, dan INFLASI
TERHADAP PENYALURAN KREDIT UMKM BANK
PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) PERIODE 2008-20011**

Disusun Oleh :
DARA PUSPITA NADYA PUTRI
NIM : 1M.07.1108

Dinyatakan diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi STIE Bank BPD
Jateng pada tanggal 23 Mei 2012

TIM PENGUJI

TANDA TANGAN

1. Djoko Santosa, SE, MM
NIDN. 0614045201

2. Piji Pakarti, SE, MSi
NIDN. 0613097002

3. Yanuar Rachmansyah Djoko Waluyo, SE, MSi
NIDN. 0620016901



Dr. H. Djoko Sudantoko, S.Sos, MM
NIDN: 0607084501

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menyediakan berbagai jasa keuangan. Peranan bank sebagai lembaga perantara tercermin dari kemampuan menyalurkan dana yang dihimpun serta dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya dan salah satu bentuk adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran Bank Indonesia melalui pelaksanaan kebijakan moneter juga berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga *BI rate* dan upaya mengendalikan kestabilan nilai tukar memberikan peluang bagi pengusaha UMKM untuk meningkatkan akses kredit serta membentuk optimisme pelaku usaha UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan tahun dasar 2008-2011 maka diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap kredit UMKM, pengaruh negatif dan signifikan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap kredit UMKM, pengaruh positif dan signifikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap kredit UMKM, tidak ada pengaruh Inflasi terhadap kredit UMKM. Pengaruh positif dan signifikan DPK, NPL, LDR, dan Inflasi secara bersama-sama terhadap kredit UMKM. Hasil perhitungan diketahui koefisien determinasi atau *adjusted R²* sebesar 35,9% *predictor* kredit UMKM dipengaruhi masing-masing variabel DPK, NPL, LDR, dan Inflasi. Sisanya 64,1% dipengaruhi oleh faktor di luar variabel tersebut.

Kata kunci: DPK, NPL, LDR, dan Inflasi, kredit UMKM

ABSTRACT

Bank is a financial institution or a company engaged in the financial sector that provides various financial services. The role of banks as reflected in the ability of intermediaries to channel funds raised and returned to the community in the form of credit. Various types of business activities also resulted in the need for various types of credit requirements and is one form of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). The Role of Bank Indonesia through the implementation of monetary policy also affects the development of UMKM. Monetary policy through interest rate cuts BI rate and exchange rate stability control efforts provide an opportunity for UMKM entrepreneurs to improve access to credit and establish business optimism UMKM.

Based on the results of research on the Bank Pembangunan Daerah (BPD) with base year 2008-2011 it is concluded that there are positive and significant influence of Third Party Funds (DPK) for UMKM loans, and a significant negative effect of non-performing loans (NPLs) of UMKM credit, the influence positive and significant loan to Deposit Ratio (LDR) of UMKM credit, there is no effect of inflation on UMKM loans. Positive and significant deposits, NPL, LDR, and inflation jointly to credit of UMKM. Calculation results are known coefficient of determination or adjusted R^2 of 35.9% predictor of UMKM credit variables influenced each DPK, NPL, LDR, and Inflation. The remaining 64.1% is affected by factors outside of those variables.

Keyword: DPK, NPL, LDR, and Inflation, UMKM credit

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah saya,

Nama : Dara Puspita Nadya Putri

NIM : 1M.07.1108

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul

“ANALISIS PENGARUH DPK, NPL, LDR, dan INFLASI TERHADAP PENYALURAN KREDIT UMKM BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) PERIODE 2008-2011”

telah saya susun dengan sebenar-benarnya dengan memperhatikan kaidah akademik dan menjunjung tinggi hak atas karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi maupun unsur kecurangan lainnya pada skripsi yang telah saya buat tersebut, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan saya siap menerima segala konsekuensi yang ditimbulkannya termasuk pencabutan gelar keserjanaan yang telah diberikan kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, 10 Mei 2012



Dara Puspita N.P.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Papa dan mama yang tak pernah mengenal kata menyerah dalam segala hal untuk memberikan yang terbaik dan dorongan semangat serta doa yang tak pernah berhenti terucap untuk anak-anaknya. *I love you Papa, I love you Mama.*
2. Kakakku satu-satunya yang terkadang menyebalkan tapi sangat bisa di andalkan, terima kasih atas semua waktu dan kesediaan yang diberikan untuk menuruti segala kemauanku yang terkadang menjengkelkan. Terima kasih juga untuk semangat yang kau berikan untuk adikmu ini.
3. Om, tante, mbah, kakak-adik sepupuku, dan keponakanku yang tak pernah merasa sepi dan selalu senang disekeliling kalian. Terima kasih juga untuk semangat yang kalian berikan untukku.
4. "ASH" atas segala rasa yang diberikan. Terima kasih atas semangat dan doa yang kamu berikan untuk aku. Akhirnya aku bisa menyelesaikan skripsi aku dan dari sini semua akan dimulai. *Saranghae, Oppa.*

MOTTO

*Yang anda pikirkan, menentukan yang anda lakukan.
Dan yang anda lakukan, menentukan yang anda hasilkan.
Maka ukuran dan kualitas dari pikiran anda, menentukan ukuran dan kualitas
hasil dari pekerjaan anda.*

*Untuk itu, janganlah hanya menginginkan yang mudah.
Janganlah keinginanmu untuk yang mudah, menjauhkanmu dari belajar
menguasai yang sulit. Sesungguhnya, karena kemampuanmu lebih besar daripada
semua kesulitanmu.*

*Kehidupan ini yang sebetulnya sulit bagi semua orang, akan tampil sangat mudah
bagimu, dan akan berlaku sangat ramah kepadamu.*

“Mario Teguh”

STIE BPD Jateng

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, rahmat, ridho dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENGARUH DPK, NPL, LDR, dan INFLASI TERHADAP PENYALURAN KREDIT UMKM BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (BPD) PERIODE 2008-2011”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng Semarang.

Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk moril maupun materiil. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak H. Dr. Djoko Sudantoko, S.Sos. MM. selaku Ketua STIE Bank BPD Jateng Semarang.
2. Bapak Drs. Hery Prasetya, MM. selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Bank BPD Jateng Semarang.
3. Bapak Djoko Santosa, SE. MM. selaku dosen pembimbing I, terima kasih telah memberikan bantuan, arahan, bimbingan, saran, dan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muliawan Hamdani, SE. MM. selaku dosen pembimbing II, terima kasih telah memberikan bantuan, arahan, bimbingan, saran, dan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Hery Prasetya, MM. selaku dosen wali, terima kasih telah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan dari semester awal sampai akhir.
6. Seluruh dosen manajemen dan akuntansi, terima kasih telah memberikan berbagai ilmu bermanfaat baik formal dan informal kepada penulis.
7. Seluruh staf STIE Bank BPD Jateng, terima kasih atas bantuannya.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semuanya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena kurangnya pengalaman dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan terbuka penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun.

Semarang, Mei 2012

Peneliti

STIE BPD Jateng

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	12
1.3 Perumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Teoritis	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
1.6 Kerangka Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Pengertian Bank..	16
2.2 Fungsi Bank.....	18
2.3 Jenis-Jenis Bank.....	19
2.4 Sumber Dana Bank.....	23
2.5 Pengertian Kredit.....	28
2.5.1 Unsur-Unsur Kredit.....	28
2.5.2 Jenis-Jenis Kredit.....	30
2.6 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).....	33
2.7 Jaminan Kredit.....	36
2.8 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	37
2.9 Dana Pihak Ketiga (DPK).....	42
2.10 <i>Non Performing Loan</i> (NPL).....	43
2.11 Loan to Deposit Ratio (LDR).....	44
2.12 Inflasi.....	45
2.13 Hipotesis.....	47
2.14 Kerangka Pemikiran.....	51
2.15 Penelitian Terdahulu.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Definisi Konsep	57
3.2 Definisi Operasional	59
3.3 Populasi dan Sampel	60
3.4 Metode Pengumpulan Data	62
3.5 Metode Analisis Data.....	63

3.5.1 Analisis Deskriptif.....	63
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	63
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	63
3.5.2.2 Uji Heterokedastisitas.....	64
3.5.2.3 Uji Multikolinearitas.....	66
3.5.2.4 Uji Autokorelasi.....	66
3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	67
3.6 Pengujian Hipotesis.....	68
3.6.1 Uji t (Pengaruh Secara Parsial).....	68
3.6.2 Uji F.....	70
3.7 Koefisien Determinasi (R^2).....	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	72
4.1 Gambaran Objek Penelitian.....	72
4.1.1 Bank BPD Aceh.....	72
4.1.2 Bank Sumut.....	73
4.1.3 bank Nagari.....	73
4.1.4 Bank Riau Kepri.....	74
4.1.5 Bnak Jambi.....	74
4.1.6 Bank Bengkulu.....	75
4.1.7 Bank Sumsel Babel.....	76
4.1.8 Bank Lampung.....	76
4.1.9 Bank BJB.....	77
4.1.10 Bank Jateng.....	78
4.1.11 Bank BPD DIY.....	78

4.1.12 Bank Jatim.....	79
4.1.13 Bank BPD Bali.....	79
4.1.14 Bank NTB.....	80
4.1.15 Bank NTT.....	80
4.1.16 Bank Kaltim.....	81
4.1.17 Bank Kalteng.....	82
4.1.18 Bank Kalsel.....	83
4.1.19 Bank Sulut.....	83
4.1.20 Bank Sulteng.....	84
4.1.21 Bank BPD Sultra.....	84
4.1.22 Bank Maluku.....	84
4.1.23 Bank Papua.....	84
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	85
4.2.1 Metode Analisis Data.....	85
4.2.1.1 Analisis Deskriptif.....	85
4.2.1.2 Uji Asumsi Klasik.....	86
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	86
4.2.2.2 Uji Heterokedastisitas.....	87
4.2.2.3 Uji Multikolinearitas.....	89
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	89
4.2.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	90
4.2.4 Pengujian Hipotesis.....	92
4.2.2.1 Uji t.....	92
4.2.2.1.1 Pengujian Koefisien Regresi Variabel DPK terhadap	

Kredit UMKM.....	93
4.2.2.1.2 Pengujian Koefisien Regresi Variabel NPL terhadap Kredit UMKM.....	95
4.2.2.1.3 Pengujian Koefisien Regresi Variabel LDR terhadap Kredit UMKM.....	96
4.2.2.1.4 Pengujian Koefisien Regresi Variabel Inflasi terhadap Kredit UMKM.....	98
4.2.2.2 Uji F.....	99
4.2.3 Analisis Determinasi (R^2).....	101
BAB V PENUTUP	102
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Keterbatasan	103
5.3 Saran	103
5.4 Implikasi Manajerial	104
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	
<i>Ciriculum Vitae</i> (CV)	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Perkembangan Data Sektor UMKM di Indonesia	4
Tabel 2 : Rincian Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank	9
Tabel 3 : Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	54
Tabel 4 : Nama Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang menjadi sampel	62
Tabel 5 : Analisis Deskriptif (<i>Descriptive Statistics</i>)	85
Tabel 6 : Uji Normalitas (<i>One-Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>)	87
Tabel 7 : Uji Multikolinearitas (<i>Coefficients</i>)	89
Tabel 8 : Uji Autokorelasi (<i>Model Summary^b</i>)	90
Tabel 9 : Analisis Regresi Linier Berganda (<i>Coefficients^a</i>)	91
Tabel 10 : Uji t (<i>Coefficients^a</i>)	93
Tabel 11 : Uji F (ANOVA ^b)	99
Tabel 12 : Analisis Determinasi (R^2)	101

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Kerangka Penelitian	15
Gambar 2 : Kerangka Pemikiran	53
Gambar 3 : Uji t	69
Gambar 4 : Uji F	70
Gambar 5 : Pengujian Koefisien Regresi Variabel DPK	94
Gambar 6 : Pengujian Koefisien Regresi Variabel NPL	95
Gambar 7 : Pengujian Koefisien Regresi Variabel LDR	97
Gambar 8 : Pengujian Koefisien Regresi Variabel Inflasi	99
Gambar 9 : Hasil Uji F	100

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Penelitian
- Lampiran 2 : Analisis Deskriptif
- Lampiran 3 : Uji Normalitas
- Lampiran 4 : Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 5 : Uji Multikolinearitas
- Lampiran 6 : Uji Autokorelasi
- Lampiran 7 : Regresi

STIE BPD Jateng

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menyediakan berbagai jasa keuangan (Kasmir, 2007: 11). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai lembaga keuangan, peran bank sangat penting bagi perekonomian negara. Peran tersebut antara lain sebagai *financial intermediary* maupun *institute of economic development* (Faisal, 2005:17). Sebagai perantara keuangan (*finansial intermediary*), kegiatan usaha bank meliputi 3 (tiga) kegiatan utama. Pertama, kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito yang sering disebut dengan istilah *funding*. Kedua, kegiatan usaha bank dalam menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman (kredit) yang dikenal dengan istilah *lending*. Ketiga, kegiatan usaha bank dalam memberikan jasa bank lainnya (*service*) (Kasmir, 2007: 12).

Fungsi bank sebagai perantara keuangan masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana disamping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya, faktor “kepercayaan” dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Bank mempunyai fungsi tambahan salah satunya adalah sebagai *agent of development* (agen pembangunan). Fungsi agen pembangunan berarti bank diharapkan dapat membiayai kegiatan ekonomi produktif sehingga akan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Jika sistem dan kelembagaan industri perbankan baik, perbankan akan sangat

bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan dana yang disediakan oleh bank sebagai perantara untuk menggerakkan sektor riil. Pembangunan negara akan berjalan baik apabila sektor perbankan turut terlibat dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan.

Peranan bank sebagai lembaga perantara tercermin dari kemampuan menyalurkan dana yang dihimpun serta dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit yang disalurkan akan menentukan tingkat keuntungan bank. Sehingga, bank akan dapat tumbuh dan berkembang dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Menurut Mudrajad Kuncoro (2002: 76), kredit dapat dikelompokkan dari segi jenis yaitu: Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Konsumtif.

Kredit Investasi digunakan untuk keperluan pengadaan barang modal untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru. Sedangkan Kredit Modal Kerja digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional terutama untuk mendukung aktiva lancar. Adapun Kredit Konsumtif digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi yang bersifat non produktif, misalnya untuk membeli rumah, membeli mobil, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan konsumtif lainnya.

Kredit juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kegiatan dan salah satu bentuk adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah).

Di Indonesia, sektor usaha yang ada sebagian besar adalah sektor usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perkembangan sektor UMKM cenderung meningkat sejak tahun 2005-2009.

Tabel 1.1
Perkembangan Data Sektor UMKM di Indonesia
Periode Tahun 2005-2009

Indikator	Satuan	TAHUN					Perkembangan th. 2005-2009
		2005	2006	2007	2008	2009	
Unit usaha	Unit	47.017.062	49.021.803	50.145.800	51.409.612	52.764.603	12,22%
Tenaga kerja	Orang	83.586.616	87.909.598	90.491.930	94.024.278	96.211.332	15,10%
PDB atas dasar harga Berlaku	Miliar	1.494.631,9	1.783.423,8	2.107.868,1	2.613.226,1	2.993.151,7	110,26%
PDB atas dasar konstan	Miliar	979.501,3	1.035.615,3	1.100.670,9	1.165.753,2	1.214.725,3	24,01%
Ekspor non migas	Miliar	110.338,1	123.767,9	140.363,8	178.008,3	162.254,5	47,05%

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (www.depkop.go.id)

Tabel 1.1 memberikan indikasi bahwa unit usaha mengalami perkembangan sebesar 12,22%, tenaga kerja juga mengalami perkembangan sebesar 15,10%, PDB atas dasar harga berlaku mengalami perkembangan sebesar 110,26%, PDB atas harga konstan 2000 mengalami perkembangan sebesar 24,01%, ekspor non migas mengalami perkembangan sebesar 47,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan dan kondisi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2005 sampai tahun 2009.

Sejalan dengan ketentuan BI maka sejak tahun 2005 perbankan telah mulai turut mengembangkan KUK, karena sektor usaha tersebut cukup tahan dalam menghadapi krisis. Selanjutnya dengan kebijakan BI yang menggantikan KUK menjadi UMKM, maka perbankan mengganti strategi kearah pembiayaan UMKM. Sampai dengan tahun 2011, bank-bank tetap bersemangat menggarap

segmen ini, meski hasil akhirnya tidak merata. Sebagian bank pertumbuhannya pasif, beberapa yang lain melonjak tinggi. Sektor ini masih memiliki potensi besar untuk diberi pembiayaan perbankan. Dengan jumlah unit usaha yang belum banyak terkover perbankan dan kemampuan menyerap tenaga kerja, sektor ini memberikan nilai tambah penggerak roda perekonomian sektor riil yang harus mendapatkan perhatian perbankan.

Peran Bank Indonesia melalui pelaksanaan kebijakan moneter juga berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga *BI rate* dan upaya mengendalikan kestabilan nilai tukar memberikan peluang bagi pengusaha UMKM untuk meningkatkan akses kredit serta membentuk optimisme pelaku usaha UMKM. Selain itu, upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan akses UMKM terhadap kredit perbankan juga dilakukan baik melalui himbuan kepada perbankan untuk membantu pengembangan UMKM melalui pemberian kredit, maupun melalui bentuk pelatihan bagi pengusaha UMKM seperti pelatihan pembuatan proposal kredit. Pelatihan tersebut sangat penting untuk menjadikan usaha UMKM lebih mudah mendapatkan kredit perbankan (*bankable*).

Sumbangan pasar domestik terhadap pertumbuhan ekonomi terus meningkat yang menandakan terjadinya peningkatan daya beli masyarakat. Sangat jelas terlihat bahwa kekuatan pasar domestik kian membesar. Namun, sektor ini masih minim mendapatkan kucuran kredit perbankan. Akses yang terbatas terhadap kredit perbankan menghambat potensi tersebut sehingga tidak semua UMKM mendapatkan fasilitas kredit. Pada awal tahun 2012, jumlah wirausaha saat ini hanya 1,56% dari total penduduk di bawah negara Cina, Jepang, Singapura dan Malaysia yang di atas 5%. Idealnya, saat ini Indonesia memiliki 4,8 juta wirausaha. Dalam data Kementerian Koperasi dan UMKM, saat ini ada 55,3 juta unit usaha di Indonesia, 98% diantaranya usaha Mikro. Padahal angka pengangguran di Indonesia masih 6,8% dan kemiskinan 12,36% (kompas, 5 Maret 2012).

Penyaluran kredit perbankan, termasuk kredit UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dalam sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi

permintaan, permintaan kredit akan ditentukan oleh harga (suku bunga) dari kredit dan faktor-faktor lain seperti aktivitas perekonomian, kondisi internal debitur (perusahaan), dan faktor non-ekonomi lainnya (Boedi Armanto, 2005). Secara teori, suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit. Artinya kenaikan suku bunga akan menurunkan jumlah kredit yang diminta sedangkan penurunan suku bunga akan menaikkan jumlah kredit yang diminta. Sedangkan kondisi perekonomian yang baik dan kondisi internal debitur yang sehat akan menaikkan permintaan kredit (Chaikal Nuryakin dan Perry Warjiyo, 2006). Secara teoritis, tingginya inflasi dan terdepresiasi nilai tukar mata uang domestik menyebabkan penurunan permintaan kredit perbankan (Gerry Danisty, 2009).

Sedangkan dari sisi penawaran, Penawaran kredit juga ditentukan oleh suku bunga kredit dan faktor-faktor lain seperti karakteristik internal kreditur (bank), yang meliputi kapasitas kredit (Dana Pihak Ketiga), efisiensi operasional (BOPO), kualitas aset perbankan, permodalan, dan *non-performing loans* (NPLs). Secara teori, suku bunga kredit berhubungan positif dengan jumlah kredit yang ditawarkan. Sementara itu, rendahnya efisiensi dan kualitas aset perbankan, tingginya NPLs, rendahnya modal dan kapasitas kredit akan menurunkan penawaran kredit (Chaikal Nuryakin dan Perry Warjiyo, 2006).

Menurut Perry Warjiyo (2004), selain dana yang tersedia (DPK), perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi Bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Berdasarkan uraian diatas, maka variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan Inflasi ditetapkan sebagai variabel penelitian termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Salah satu upaya yang harus dilakukan

perbankan Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemberdayaan UMKM.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas (Kasmir, 2007: 47). Dalam Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dana yang dihimpun bank umum dari masyarakat tersebut biasanya berbentuk simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

Non Performing Loan (NPL) adalah kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank (Meydianawathi, 2007: 138).

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2007: 272). Standar terbaik LDR menurut ketentuan Bank Indonesia adalah 78%-100%.

Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi (www.wikipedia.org). Inflasi yang tinggi berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga permintaan kredit konsumsi akan menurun pula.

Penelitian oleh Luh Gede Meydianawathi (2006) dengan judul “Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)” telah menyimpulkan bahwa secara simultan variabel-variabel DPK, CAR, ROA, dan NPLs berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja yang disalurkan bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia. Variabel DPK, CAR, dan ROA secara parsial menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM. Sebaliknya, NPLs menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap penawaran kedua jenis kredit tersebut.

Penelitian oleh Gerry Danisty (2009) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Kredit UMKM di Indonesia” telah menyimpulkan bahwa Permintaan kredit UMKM di Indonesia dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh GDP (*Gross Domestic Product*) dan nilai tukar. Sebaliknya suku bunga kredit perbankan dan inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM di Indonesia. Sedangkan Penawaran kredit UMKM di Indonesia dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh DPK dan LDR. Sebaliknya CAR dan NPL berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit UMKM di Indonesia. Suku bunga kredit perbankan pengaruhnya tidak signifikan terhadap penawaran kredit UMKM di Indonesia.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah yang mengamalkan masing-masing pemerintah daerah untuk mendirikan BPD. Berdasarkan ketentuan tersebut, saat ini tidak setiap provinsi terdapat Bank Pembangunan Daerah (BPD) karena adanya penggabungan BPD. Sehingga terdapat 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tersebar di provinsi di Indonesia. Untuk mendukung gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) membuat satu program yaitu BPD Region Champion (BRC). Visi BRC adalah menjadi bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional. BRC mempunyai tiga pilar yaitu: (1) Ketahanan kelembagaan yang kuat, (2) Kemampuan sebagai Agent of Regional Development dan (3) Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat.

Apex Bank pada dasarnya merupakan bank induk yang akan membantu mendukung aktivitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pasar, Perkreditan Kecamatan/Desa, sehingga mampu berperan secara lebih optimal dalam membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun sejauh ini, baru 2 BPD yang

mempraktekkan diri sebagai Apex Bank yaitu Bank Jatim dan Bank Nagari (Booklet Asbanda, 21 Desember 2010).

Dari data yang dipublikasikan mengenai Bank Pembangunan Daerah (BPD), rincian kredit UMKM menurut kelompok bank adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rincian Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank
Miliar Rp

Penyaluran Kredit UMKM (Miliar Rp)				
No.	Jenis Bank	Jan 2011	Jan 2012	Pertumbuhan
1.	Bank Persero	163.252	197.259	20,83%
		45,26%	46,80%	
2.	BPD	30.143	30.045	(0,33%)
		8,36%	7,13%	
3.	Bank Swasta Nasional	159.151	187.047	17,53%
		44,13%	44,38%	
4.	Bank Asing dan Campuran	8.127	7.107	(12,55%)
		2,25%	1,69%	
Total kredit UMKM		360.673	421.458	16,85%
Total kredit		1.746.005	2.160.215	23,72%
Rata-rata porsi kredit UMKM		20,66%	19,51%	
No.	Jenis Pengguna	Jan 2011	Jan 2012	Pertumbuhan
1.	Modal Kerja	282.705	318.675	25,87%
		78,38%	75,61%	
2.	Investasi	77.960	102.783	31,19%
		21,62%	24,39%	
3.	Konsumsi	-	-	-
		-	-	
4.	Tidak teridentifikasi	8	-	
Total		360.673	421.458	16,85%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Vol. 10, No. 1, Desember 2011

Berdasarkan tabel 1.2, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Kredit UMKM yang disalurkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki pangsa pasar (*market share*) kredit UMKM kecil dan cenderung menurun. Pangsa pasar (*market share*) dari 8,36% pada Januari 2011 turun menjadi 7,13% pada Januari 2012.
2. Pertumbuhan kredit UMKM Bank Pembangunan Daerah (BPD) cenderung menurun dan negatif (0,33%) jika dibandingkan dengan pertumbuhan Bank Persero dan Bank Swasta Nasional yang cenderung naik dan positif.

Melihat permasalahan di atas, Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih dinilai lemah dalam hal penyaluran kredit untuk kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal kredit UMKM merupakan salah satu pasar utama bank yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan melihat potensi dan peluang, seharusnya memang sangat memungkinkan bagi BPD untuk mewujudkan komitmen untuk menjadi *regional champion* yang seharusnya lebih menguasai jaringan di daerah masing-masing dibandingkan dengan bank umum lain. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kredit UMKM di Indonesia. Untuk itu penulis mengambil judul “ **Analisis Pengaruh DPK, NPL, LDR, dan Inflasi terhadap Penyaluran Kredit UMKM Bank Pembangunan Daerah (BPD) Periode Tahun 2008-2011** “.

1.2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah adalah bagian identifikasi dari masalah yang akan diteliti atau batasan-batasan dari masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah bertujuan untuk memfokuskan lingkup permasalahan supaya pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan menghindari pembahasan diluar permasalahan (Ahmad Kurnia, 2009). Batasan dari penelitian ini adalah:

1. Variabel terikat (*Dependent*) adalah Kredit UMKM.
2. Variabel bebas (*Independent*) adalah DPK, NPL, LDR, dan Inflasi.
3. Objek dalam penelitian ini adalah 23 BPD
4. Periode pengamatan tahun 2008-2011.
5. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2011 sampai pada bulan April 2012.

1.3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah atau *research questions* atau disebut juga sebagai *research problem*, diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab akibat. Perumusan masalah berfungsi sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan dan sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu penelitian (Ahmad Kurnia, 2009).

Pangsa pasar (*market share*) kredit UMKM Bank Pembangunan Daerah (BPD) kecil dan cenderung menurun yaitu sebesar 8,36% pada Januari 2011 turun menjadi 7,13% pada Januari 2012 serta pertumbuhan kredit UMKM yang cenderung menurun dan negatif (0,33%) di bawah Bank Persero dan Bank Swasta Nasional yang cenderung menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dan positif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011?
2. Apakah terdapat pengaruh NPL terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011?
3. Apakah terdapat pengaruh LDR terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011?
4. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011?
5. Apakah terdapat pengaruh simultan DPK, NPL, LDR dan Inflasi terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh NPL terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh LDR terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan DPK, NPL, LDR dan Inflasi terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, yakni:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan bisa diberikan oleh penelitian ini adalah:

1. Memperluas cakrawala pengetahuan dalam bidang perbankan terutama yang terkait dengan kajian mengenai peran bank dalam penyaluran kredit bagi kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Menjadi salah satu referensi penelitian yang mengetengahkan peran bank dalam penyaluran kredit dan penguatan kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Menemukan keterkaitan atau bahkan kesenjangan antara teori dengan kenyataannya.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak:

1. STIE Bank BPD Jateng

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan peran bagi perwujudan tridarma perguruan tinggi terutama terkait dengan penelitian.

2. Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi wahana aplikasi teori-teori dalam bidang penelitian yang pernah dipelajari sebelumnya.

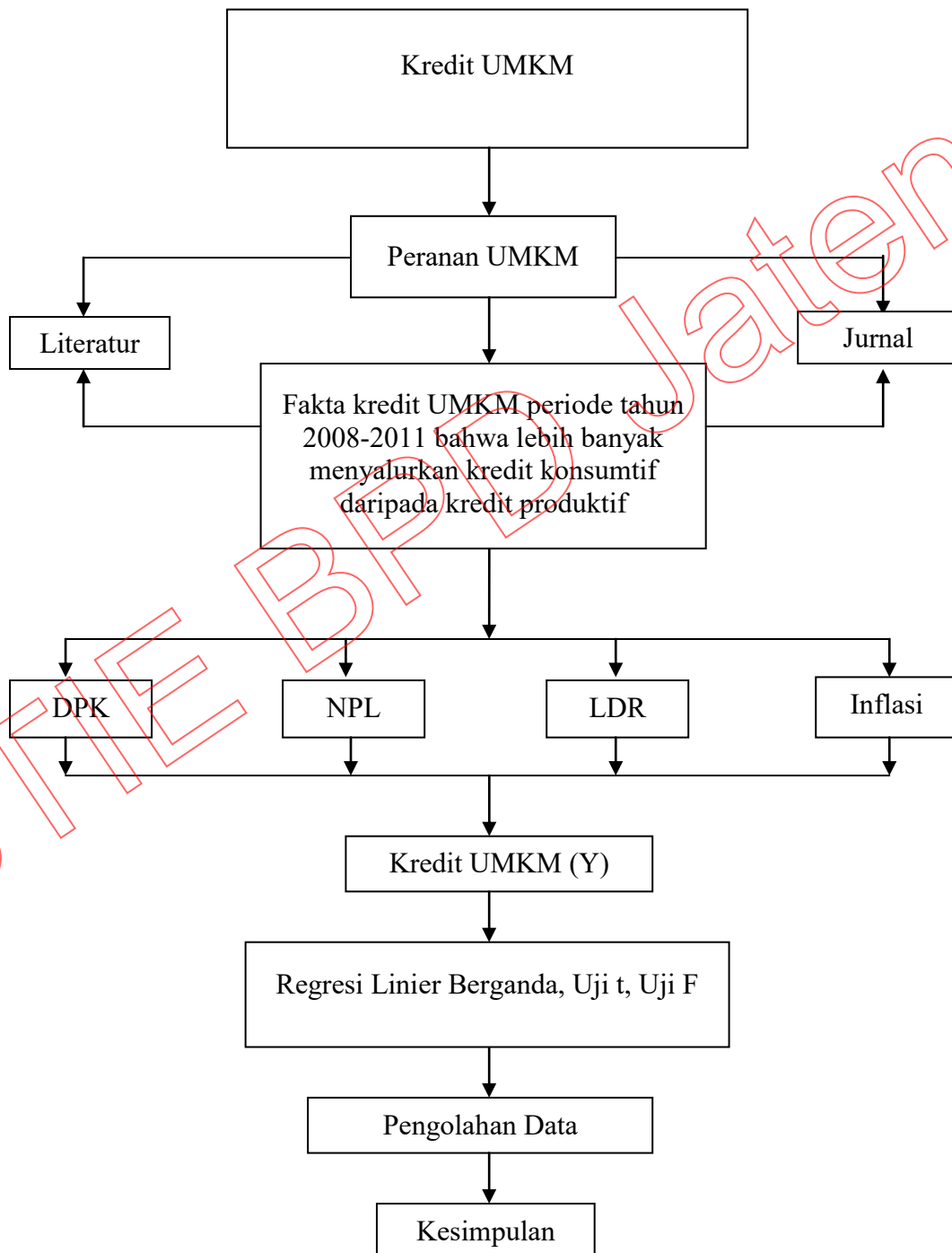
3. Pembaca/Masyarakat

Dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

STIE BPD Jateng

1.6. Kerangka Penelitian

Gambar 1.1



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Pengertian bank Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Kasmir (2007: 11), usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

a. Kegiatan penghimpunan dana

Kegiatan penghimpunan dana adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito serta deposito berjangka di mana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga dari bank. Kemudian rangsangan lainnya dapat berupa cendera mata,

hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan, akan menarik minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya di bank.

b. Kegiatan menyalurkan dana

Kegiatan menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *Lending*. Dalam pemberian kredit disamping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal. Besar kecilnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Di samping bunga simpanan pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *Spread Based*. Jika bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negatif spread*.

c. Memberikan jasa bank lainnya

Memberikan jasa bank lainnya adalah jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan (*service*). Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung

kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

1. Jasa setoran seperti telepon, listrik, air, atau uang kuliah
2. Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun atau hadiah
3. Jasa Pengiriman Uang (*Transfer*)
4. Jasa Penagihan (*Inkaso*)
5. Jasa Kliring (*Clearing*)
6. Jasa Penjualan Mata Uang Asing (*Valas*)
7. Jasa Penyimpanan Dokumen (*Safe Deposit Box*)
8. Jasa Cek Wisata (*Travellers Cheque*)
9. Jasa Kartu Kredit (*Bank Card*)
10. Jasa-jasa yang ada di pasar modal seperti penjamin emisi dan pedagan efek
11. Jasa Letter of Credit (*L/C*)
12. Jasa Bank Garansi dan referensi Bank
13. Serta jasa Bank lainnya.

2.2 Fungsi Bank

Fungsi utama bank yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, yakni fungsi *financial intermedary*, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services* (Sulistiyandari, 2009) (www.gagasanhukum.wordpress.com).

a. *Agent of Trust*

bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dasar utama kegiatan bank tersebut adalah trust atau kepercayaan. Jadi masyarakat atas dasar kepercayaan menyimpan dananya ke bank, demikian juga bank atas dasar kepercayaan meminjamkan dana tersebut kepada masyarakat. Dengan kata lain bank berfungsi sebagai lembaga *financial intermediary* dengan dasar kepercayaan.

b. *Agent of Development*

bahwa tujuan perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Jadi dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian dipinjamkan lagi ke masyarakat diharapkan digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif, dan menyerap tenaga kerja banyak, serta menghasilkan barang/jasa yang punya nilai lebih. Dengan demikian kegiatan utama bank tersebut adalah kegiatan untuk pembangunan perekonomian masyarakat.

c. *Agent of Services*

selain melakukan kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa bank itu antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan, dan jasa penyelesaian tagihan.

2.3 Jenis-Jenis Bank

Jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank (Malayu S.P. Hasibuan, 2009: 27), yaitu:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, di mana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, bank umum dapat melakukan kegiatan usaha pokok berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
 - Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lain.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga (*safe deposit box*).
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (*custodian-ship*).
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku (Malayu S.P. Hasibuan, 2009: 36).

Selain usaha-usaha pokok di atas, bank umum dapat pula melakukan kegiatan tambahan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun dengan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku (Malayu S.P. Hasibuan, 2009: 37).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan.

Untuk mewujudkan tugas pokoknya tersebut, BPR dapat melakukan usaha berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.

3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain (Malayu S.P. Hasibuan, 2009: 38).

2.4 Sumber Dana Bank

Terdapat dua sumber dana bagi kelangsungan usaha perbankan di Indonesia (Ade Arthesa, 2009: 60), yaitu:

a. Dana yang bersumber dari dalam bank (internal)

Pada umumnya dana yang bersumber dari bank sendiri mempunyai proporsi yang rendah jika dibandingkan dengan dana yang bersumber dari luar bank. Namun, dana itu sendiri merupakan hal yang penting bagi kelangsungan usaha bank bersangkutan, karena bersifat permanen dan terus mengendap selama bank tersebut berdiri. Dana yang bersumber dari dalam bank adalah:

1. Modal yang disetor dari seluruh pemegang saham.
2. Cadangan-cadangan.
3. Keuntungan yang belum dibagikan ke pemegang saham.
4. Dana dari penjualan saham dari bursa.
5. Agio saham.

Modal yang disetor tidak mudah untuk ditarik oleh pemegang saham dan jika harus ditarik harus melalui persetujuan dalam rapat umum pemegang saham, kemudian diumumkan ke media dan terakhir mendapat pengesahan dari departemen kehakiman.

b. Dana yang bersumber dari luar bank (eksternal)

Dana yang bersumber dari luar bank terdiri dari dua sumber, yaitu:

1. Dana yang bersumber dari masyarakat

Dana yang bersumber dari masyarakat terdiri dari tiga macam rekening (Ade Arthesa, 2009: 63), yaitu:

a. Tabungan (*saving deposit*)

Tabungan (*saving deposit*) adalah jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan melalui syarat-syarat tertentu, serta dapat dilakukan setiap saat melalui kantor bank, *Automatic Teller Machine* (ATM), dan kartu debit. Setiap penabung / nasabah akan diberikan buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya di bank tersebut. Fungsi buku tabungan adalah sebagai catatan bagi setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah. Pada saat ini, setiap penabung umumnya dapat diberikan kartu ATM yang dapat digunakan untuk menarik tabungan pada mesin ATM atau dapat pula digunakan sebagai kartu debit. Fungsi kartu debit adalah untuk pembayaran setiap transaksi pembelian barang.

b. Simpanan Berjangka (*time deposit*)

Simpanan berjangka (*time deposit*) atau dikenal dengan deposito merupakan simpanan dana masyarakat dimana penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank. apabila nasabah menarik dananya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, nasabah akan dikenakan denda. Ada beberapa jenis produk simpanan berjangka (Ade Athesa, 2009: 66), yaitu:

1. Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan atas nama, dengan demikian simpanan ini hanya dapat dicairkan oleh pemilik deposito atau yang namanya tercantum dalam *bilyet deposito* tersebut.

2. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas unjuk, dimana bukti simpanan ini dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke pihak ketiga. Bunga atas sertifikat deposito ini di bayar di muka atau di potong dari harga nominalnya pada saat pembelian sertifikat deposito tersebut.

3. *Deposito on call*

Deposito on call adalah berupa simpanan yang tetap berada di bank selama nasabah tidak membutuhkannya. Nasabah dapat menarik dana tersebut apabila dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Semakin besar dana yang akan ditarik, semakin lama pula jangka waktu pemberitahuan sebelumnya. *Deposito on call* umumnya disukai oleh para nasabah yang menyimpan dana dalam waktu lama atau tidak membutuhkan dana dengan segera. Keperluan dana oleh nasabah telah dapat diprediksi sebelumnya dalam jangka waktu tertentu.

c. Giro (*demand deposit*)

Giro (*demand deposit*) adalah jenis simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek untuk penarikan tunai atau *bilyet* untuk pemindahbukuan antar rekening. Cek dan bilyet giro ini adalah fasilitas yang diberikan pihak bank ke pemilik rekening giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangannya. Bagi bank, sumber dana yang berasal dari giro merupakan sumber dana jangka pendek dan berfluktuatif lebih cepat dibandingkan dengan jenis simpanan lainnya. Bank umumnya memberikan bunga yang paling rendah pada rekening giro dibandingkan dengan jenis simpanan lain.

2. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan

Sumber dana yang bersumber dari lembaga keuangan diperoleh bank melalui (Ade Arthesa, 2009: 71):

a. *Call Money*

Call money adalah sumber dana yang diperoleh dari bank berupa pinjaman jangka pendek yang didapatkan dari *interbank call money market*. Umumnya sumber dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam jangka pendek, misalnya kalah kliring atau terjadi penarikan besar-besaran atas dana yang disimpan dalam suatu bank (rush). Dana ini mempunyai tingkat bunga yang fluktuatif karena umumnya bank yang memiliki dana memiliki kekuatan penawaran (*bargaining power*) yang tinggi dan sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan ketersediaan dana. *Call money* dimanfaatkan oleh bank yang mempunyai tingkat likuiditas tinggi (surplus dana) untuk memperoleh sumber pendapatan atau keuntungan dalam waktu singkat. Karena sifatnya mendesak, *call money* umumnya memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pinjaman pada umumnya.

b. Pinjaman Antar bank

Pinjaman antarbank yaitu pinjaman dari bank lain berupa pinjaman jangka pendek dan menengah. Untuk itu, perbankan pada umumnya menjalin kerja sama, terutama dalam bentuk bantuan permodalan dari bank yang memiliki tingkat likuiditas tinggi ke bank yang memiliki tingkat likuiditas rendah. perbedaannya dengan *call money* adalah bahwa pinjaman ini bukan untuk kebutuhan keuangan yang mendesak, namun untuk memenuhi kebutuhan dana yang telah terencana dalam rangka pengembangan kegiatan atau aktivitas bank.

c. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Sumber dana BLBI ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dalam jangka pendek, misalnya kalah kliring atau penarikan besar-besaran atas simpanan bank. Bank Indonesia memberikan BLBI dengan tujuan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan secara umum. Bantuan likuiditas ini juga diberikan karena adanya penjaminan pemerintah atas simpanan masyarakat pada perbankan nasional.

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Surat Berharga Pasar Uang mulai diperkenalkan pada awal tahun 1985 oleh Bank Indonesia. SBPU adalah salah satu instrumen Bank Indonesia yang digunakan untuk menghimpun dana atau menyalurkan dana. Surat berharga ini mempunyai jangka waktu yang pendek dan dapat diperjualbelikan dengan cara di diskonto oleh Bank Indonesia. Pada saat bank mengalami kelebihan likuiditas (surplus dana), bank tersebut dapat membeli berbagai jenis SBPU dan menjualnya kembali apabila terjadi kekurangan likuiditas.

e. Fasilitas Diskonto Bank Indonesia

Fasilitas Diskonto Bank Indonesia ini digunakan bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau sebagai upaya terakhir bank untuk mengatasi kondisi keuangannya. Diskonto ini merupakan penyediaan dana jangka pendek dengan cara pembelian *promes* yang diterbitkan oleh bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto Bank Indonesia ini terdiri dari dua jenis (Ade Arthesa, 2009: 72), yaitu:

1. Fasilitas Diskonto I, yang digunakan untuk memperlancar pengaturan dana sehari-hari.
2. Fasilitas Diskonto II, yang digunakan untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank, sebagai akibat dari rencana penanaman dana yang tidak sesuai dengan penarikan. Sehingga timbul ketidaksesuaian pendanaan

(*mismatch*) dalam rangka penarikan dana untuk kredit jangka menengah dan panjang.

Jumlah maksimum untuk fasilitas diskonto ini tergantung pada posisi seluruh jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank yang bersangkutan pada saat fasilitas diajukan. Tingkat diskonto ditetapkan oleh Bank Indonesia secara berkala dengan memperhatikan kondisi perekonomian pada saat itu.

2.5. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari kata *creditus* menurut Noan Webster (dalam Neni Sri Imaniyati, 2010: 138), berarti “kepercayaan”, merupakan bentuk *past principle* dari kata *credere* yang berarti “to trust” (kepercayaan). Dengan demikian maka perkreditan memiliki unsur utama kepercayaan walaupun kredit itu sendiri bukan hanya sekedar kepercayaan, makna kepercayaan di sini mengandung arti, yaitu pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan (Neni Sri Imaniyati, 2010: 138).

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.5.1 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2007: 74) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Risiko

Faktor risiko dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja atau tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin janjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapakan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau

jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

2.5.2 jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Berdasarkan ciri dan tujuan penggunaan

Kredit berdasarkan ciri dan tujuan penggunaan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut (Mudrajad Kuncoro, 2002: 229):

a. Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan (misalnya perusahaan jasa transportasi, perhotelan, rumah makan dan sebagainya) baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Fasilitas KMK dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan yang merupakan satu kesatuan, misalnya:

d. KMKE (Kredit Modal Kerja Ekspor) adalah fasilitas KMK yang diberikan kepada eksportir/pemasok yang disediakan untuk membiayai kegiatan produksi, pengumpulan dan atau penyimpanan barang dalam rangka ekspor.

e. KMKI (Kredit Modal Kerja Impor) adalah fasilitas KMK untuk membiayai seluruh atau sebagian kegiatan dalam rangka impor barang, khususnya yang berhubungan dengan L/C impor yang dibuka pada *opening bank* (bank Pembuka L/C).

f. KMKL (Kredit Modal Kerja Lokal) adalah fasilitas KMK yang diberikan kepada pemohon sebagai tambahan modal kerja untuk membiayai kegiatan usahanya di luar ekspor dan impor.

b. Kredit Transaksi Khusus

Kredit Transaksi Khusus adalah fasilitas kredit yang hanya sekali pakai yang disetujui untuk suatu tujuan atau beberapa tujuan tertentu. Persetujuan atas suatu pinjaman atau transaksi khusus berlaku hingga jatuh tempo fasilitas tersebut, terkecuali dalam dokumen putusan kreditnya dicantumkan ketentuan yang memungkinkan fasilitas itu dapat diberikan kembali atau diperbaharui. Jangka waktu kredit transaksi khusus ditetapkan berdasarkan sifat dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus pemohon dan *cash flow* atau kemampuan membayar kembali.

c. Kredit Tidak Langsung (Kontinjen)

Kredit Tidak Langsung (Kontinjen) adalah kredit yang tidak memerlukan disposisi dana secara langsung pada saat kredit tersebut disetujui. Dengan demikian bank dalam hal ini mensubstitusikan kredibilitasnya bagi pemohon, artinya bahwa apabila pemohon wan prestasi atau tidak mampu melakukan pelunasan, maka bank yang berkewajiban untuk melunasinya. Misalnya: jaminan pelaksanaan (*performance bond*) suatu proyek, garansi pengapalan (*shipping guarantees*) dan pada umumnya semua bentuk garansi bank. Kredit-kredit yang bersifat tidak langsung harus dipandang sebagai kredit yang mengandung risiko yang sama dengan kredit langsung, sehingga dalam prosedur pemberiannya harus mempertimbangkan aspek-aspek perkreditan yang sehat.

d. Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan pemohon dalam memperoleh barang modal selain tanah yang tercermin dalam aktiva tetap perusahaan. Dalam memberikan kredit investasi tersebut harus diperhatikan kemampuan keuangan untuk mengangsur pokok kredit setiap periode tertentu, sehingga risiko bank makin berkurang. Dalam mengangsur pokok kredit tersebut diupayakan agar

dilakukan tepat waktu agar tidak terjadi penggelembungan (*balloon payment*) pada tahun terakhir (mendekati saat jatuh tempo kredit).

e. Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif yang diperlukan pemohon dan sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari penghasilan/gaji pemohon. Pada umumnya kredit konsumtif bunganya tinggi, karena risiko yang dihadapi oleh bank juga tinggi. Tingginya risiko yang dihadapi oleh bank tersebut tergambar pada proses pemberian kredit tersebut, yaitu cepat dan mudah cairnya. Kredit yang tergolong kredit konsumtif antara lain adalah kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan mobil (*car loan*), kredit pemilikan sepeda motor, dan sebagainya.

2. Berdasarkan jangka waktu

Kredit berdasarkan jangka waktu dapat dibedakan menjadi tiga, (Malayu S.P. Hasibuan, 2009: 89) yaitu:

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

3. Berdasarkan dari segi jaminan

Berdasarkan dari segi jaminan adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal

senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan (Kasmir, 2007: 78), adalah:

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan Bank yang bersangkutan.

2.6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ada beberapa pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM tersebut adalah:

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Bank Indonesia (Info UMKM, www.bi.co.id), Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, yaitu:

a. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi adalah Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui Kelompok Tani dan/atau Koperasi. Usaha yang dibiayai adalah:

1. padi, jagung, kedelai, ubi jalar, tebu, ubi kayu, kacang tanah, sorgum.
2. hortikultura (cabe, bawang merah, jahe, kentang dan pisang), pengadaan pangan (gabah, jagung, kedelai).
3. peternakan sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan burung puyuh, pengkapan
4. Penangkapan Ikan, Budidaya Udang, Nila, Gurame, Patin, Lele, Kerapu Macan, Ikan Mas dan pengembangan rumput Laut
5. Pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain untuk menunjang kegiatan di atas.

Plafon kredit yang diberikan adalah:

1. untuk petani, peternak, pekebun, nelayan, dan pembudidaya ikan paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan (gabah, jagung, dan kedelai) paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. untuk kelompok tani dalam rangka pengadaan/ peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)

Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan adalah kredit yang diberikan dalam rangka mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati dan Program Revitalisasi Pertanian. Usaha yang

dibiayai adalah Perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman kelapa sawit, karet dan kakao. Plafok kredit yang diberikan ditetapkan oleh Direktur Jendral Perkebunan.

c. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

Kredit Usaha Pembibitan Sapi adalah kredit yang diberikan kepada bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi. Usaha yang dibiayai adalah usaha pembibitan sapi untuk produksi bibit sapi potong atau bibit sapi perah yang dilengkapi nomor identifikasi berupa microchips. Plafon kredit yang diberikan adalah Maksimal Rp 66.315.000.000,00 per pelaku usaha (perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak).

d. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur dikecualikan untuk jenis KPR, KKB, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya. Usaha yang dibiayai adalah usaha produktif. Plafon kredit yang diberikan adalah:

1. KUR Mikro plafon maksimal Rp5.000.000,00
2. KUR Retail plafon maksimal Rp 500.000.000,00

2.7 Jaminan Kredit

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur menurut Kasmir (2007: 80) adalah sebagai berikut.

a. Jaminan dengan barang-barang seperti:

- Tanah
- Bangunan
- Kendaraan bermotor
- Mesin-mesin/peralatan

- Barang dagangan
- Tanaman/kebun/sawah
- Dan barang-barang berharga lainnya

b. Jaminan surat berharga seperti:

- Sertifikat Saham
- Sertifikat Obligasi
- Sertifikat tanah
- Sertifikat Deposito
- Promes
- Wesel
- Dan surat berharga lainnya.

c. Jaminan orang atau perusahaan

Jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung risikonya.

d. Jaminan asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gudang dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.8 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-

benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung di dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C (Kasmir, 2007: 91).

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakan pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan *sosial standingnya*. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. *Capacity (Capability)*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kreditnya.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula

menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung Bank dari risiko kerugian.

5. *Conditional*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Sedangkan penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *Character* dari 5C.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping penilaian dengan 5 C dan 7 C, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi:

1. Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

1. Aspek Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.

2. Aspek Operasi/teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

3. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

4. Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

5. Aspek Ekonomi/Sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak *benefit* atau *cost* atau sebaliknya.

6. Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

2.9 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) (Faisal, 2005: 35).

Dana dari masyarakat terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut rekening koran. Jenis rekening giro ini dapat berupa:

- a. rekening atas nama perorangan,
- b. rekening atas nama suatu badan usaha atau lembaga, dan
- c. rekening bersama atau gabungan.

2. Deposito (*Time Deposit*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Menurut Dahlan Siamat (1993: 102), dilihat dari sudut biaya dana, dana bank yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, misalnya giro atau tabungan. Kelebihan sumber dana ini adalah sifatnya yang dapat dikategorikan sebagai sumber dana semi tetap, karena penarikannya dapat diperkirakan dengan berdasarkan tanggal jatuh tempo sehingga tingkat fluktuasinya dapat diantisipasi. Apabila sumber dana bank didominasi oleh dana yang berasal dari deposito berjangka, pengaturan likuiditasnya relatif tidak terlalu sulit. Akan tetapi, dari sisi biaya dana akan sulit untuk ditekan sehingga akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang bersangkutan.

Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap di bank karena para pemegangnya (deposan) tertarik dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo (apabila dia tidak ingin memperpanjang) dananya dapat ditarik kembali. Terdapat berbagai jenis deposito, yakni:

- a. deposito berjangka,
- b. sertifikat deposito, dan
- c. *deposito on call*

3. Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Jadi Dana Pihak Ketiga adalah simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito atau simpanan berjangka. Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum pada akhir periode bulanan dinyatakan dalam Miliar Rupiah. Formula DPK yaitu:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

2.10 *Non Performing Loan (NPL)*

NPL (*Non Performing Loan*) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank (Meydianawathi, 2007). NPL merupakan cermin dari risiko kredit. Semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit

diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan cadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal, besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 NPL dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{(Kredit dalam kategori kurang lancar, diragukan, macet)}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

2.11 Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga bank pada saat tertentu. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit dengan dana yang diterima yang meliputi giro, deposito, dan tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan tidak termasuk pinjaman subordinasi, deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, modal inti, dan modal pinjaman. Kemudian disesuaikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antarbank). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, angka LDR seharusnya berada di sekitar

78% - 100%. Perhitungan LDR menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

2.12 Inflasi

2.12.1 Pengertian Inflasi

Inflasi dinyatakan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (www.bi.go.id). Inflasi adalah indikator untuk melihat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi (www.wikipedia.org).

2.12.2 Penyebab Inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal (www.wikipedia.org) yaitu:

a. Inflasi Tarikan Permintaan (*demand pull inflation*)

Tarikan permintaan dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral). Dimana terjadi akibat adanya permintaan yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment* dimana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas di pasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank

sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

b. Inflasi Desakan Biaya (*cost push inflation*)

Desakan dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (*government*) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lain sebagainya. Dimana terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dan lainnya), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tersebut, aksi spekulasi (penimbunan), dan lain sebagainya, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

2.12.3 Penggolongan Inflasi

Penggolongan inflasi dapat dilihat dari beberapa segi (www.wikipedia.org) yaitu:

a. Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri

Adalah inflasi yang terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri
Adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.
- b. Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, inflasi digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (*Closed Inflation*).
 2. Jika kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (*Open Inflation*).
 3. Jika serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (*Hyper inflation*).
- c. Berdasarkan keparahannya, inflasi di golongkan menjadi 4, yaitu:
1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
 2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
 3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
 4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

2.13 Hipotesis

Keberadaan hipotesis merupakan ciri dari penelitian kuantitatif. Hipotesis juga merupakan alat kendali bagi peneliti agar arah penelitian yang dilakukan tidak kemana-mana, selain dari tujuan penelitian. Menurut Duwi Priyatno (2010: 9), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan.

Sesuai dengan tujuan pokok permasalahan penelitian ini maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah:

1. Pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011.

Dana pihak ketiga adalah besarnya total simpanan masyarakat yang berada diperbankan yang terdiri dari tabungan, deposito, dan giro. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh suatu bank. pengaruhnya terhadap kredit yaitu apabila sumber dana mencukupi maka dana dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, tetapi bank perlu mampu menyalurkan dana dengan efektif agar aktifitas dana yang dikelola dapat terjaga dengan baik. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir, 2007: 13)

Hasil penelitian Billy Arma Pratama (2010) menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kredit.

Berdasarkan uraian di atas, diajukan hipotesis pertama yaitu:

H₁: DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

2. Pengaruh antara *Non Performing Loan* (NPL) terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011.

NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank (Meydianawathi, 2007: 138). Pengaruhnya terhadap kredit yaitu apabila keadaan nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank tersebut maka penyaluran kredit menjadi tidak optimal.

Hasil Penelitian Irma Anindita (2011) menyimpulkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, diajukan hipotesis ketiga yaitu:

H₂: NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

3. Pengaruh antara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011.

Likuiditas menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dan masa yang akan datang (Mudrajad Kuncoro, 2002: 565). Cara untuk mengetahui likuiditas perbankan adalah dengan melihat LDR. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tersebut dapat menilai seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Pengaruhnya terhadap kredit yaitu semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Berarti tidak menutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini disebabkan karena jumlah yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

Hasil Penelitian Gerry Danisty (2009) menyimpulkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, diajukan hipotesis keempat yaitu:

H₃: LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

4. Pengaruh antara Inflasi terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011.

Inflasi termasuk variabel yang mempengaruhi posisi kredit dari sisi permintaan. Pengaruhnya terhadap kredit yaitu jika inflasi tinggi maka akan menyebabkan penurunan permintaan kredit perbankan.

Hasil penelitian Gerry Danisty (2009) menyimpulkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, diajukan hipotesis kelima yaitu:

H₄: Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

5. Pengaruh antara DPK, NPL, LDR, dan Inflasi terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Permodalan bank yang cukup atau banyak sangat penting. Kredit bermasalah (NPL) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan seperti penyimpangan yang dilakukan oleh debitur maupun faktor ketidaksengajaan atau faktor eksternal diluar kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk. Tujuan perhitungan LDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh suatu bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain LDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank. Inflasi yang tinggi akan membuat permintaan kredit menurun. Selain karena inflasi yang tinggi berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga permintaan kredit konsumsi akan menurun pula. Mengingat kredit belakangan ini didominasi oleh kredit konsumsi, tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap permintaan kredit.

Hasil penelitian Luh Gede Meydianawathi (2007) menyimpulkan bahwa secara serempak variabel-variabel DPK, CAR, ROA, dan NPLs berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja yang disalurkan bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, diajukan hipotesis kelima yaitu:

H₅: DPK, NPL, LDR, dan Inflasi berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

2.14 Kerangka Pemikiran

Bank merupakan salah satu perusahaan yang menjual jasa di bidang perbankan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selain memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana, bank mempunyai fungsi tambahan yaitu antara lain sebagai agen pembangunan (*Agent of Development*).

Keberadaan sektor UMKM merupakan salah satu faktor utama penyelamat ekonomi Indonesia. Meskipun merasakan dampak krisis, daya tahan sektor UMKM masih relatif cukup baik sehingga dampaknya ke kinerja UMKM relatif terbatas. Sebagaimana yang terjadi pada gejolak krisis ekonomi yang pernah dialami terdahulu pada tahun 1997/1998 dan krisis global tahun 2008.

Untuk mendukung gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) membuat satu program yaitu *BPD Region Champion* (BRC). BRC mengusung tiga pilar yaitu (1) Ketahanan kelembagaan yang kuat, (2) Kemampuan sebagai *Agent of Regional Development* dan (3) Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat.

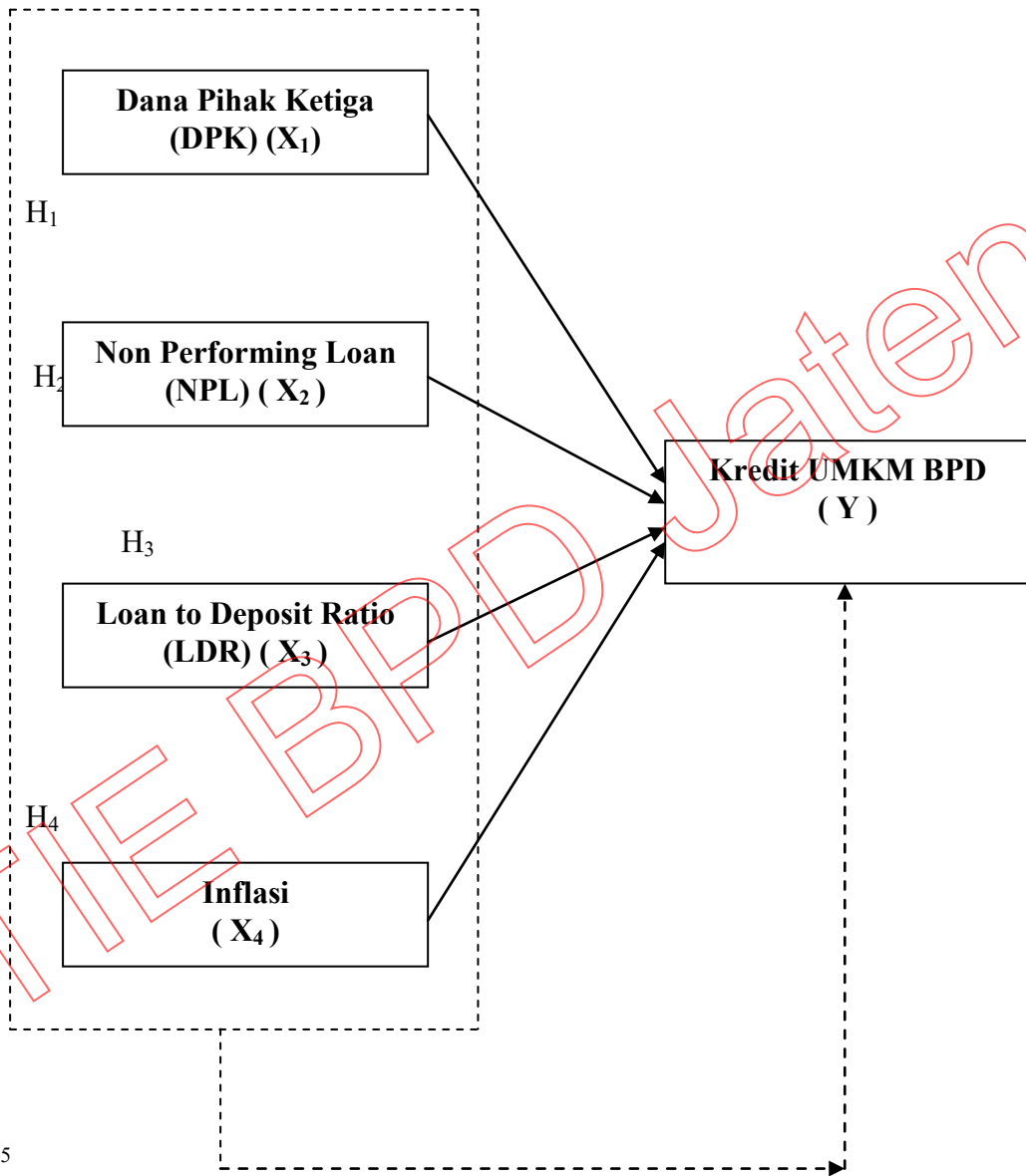
Pilar kedua dari BRC, yaitu *Agent of Regional Development* merupakan komitmen BPD untuk menjadi pendorong kegiatan pembangunan di daerah. Salah satunya dengan turut berkontribusi mengucurkan kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Semenjak BRC diluncurkan pada tanggal 21 Desember 2010, ternyata kredit konsumtif masih lebih mendominasi dibandingkan dengan kredit produktif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan seperti DPK, NPL, LDR, dan Inflasi merupakan faktor independen, sedangkan faktor dependennya yaitu kredit UMKM di Bank Pembangunan Daerah (BPD) periode tahun 2008-2011.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan kerangka penelitian sebagai berikut:

STIE BPD Jateng

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.15 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Luh Gede Meydianawathi, 2007	Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)	Variabel Dependen: Penawaran kredit investasi dan modal kerja kepada sektor UMKM di Indonesia. Variabel Independen: DPK, CAR, ROA, NPLs	Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Secara serempak DPK, CAR, ROA, dan NPLs berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja yang disalurkan bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia. - DPK, CAR, dan ROA secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM. - NPLs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor

					UMKM .
2.	Gerry Danistyoy, 2009	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Kredit di UMKM Indonesia	Variabel Dependen: Kredit UMKM. Variabel Independen: Suku Bunga Kredit Perbankan, GDP, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar, DPK, CAR, LDR, NPL.	<i>Two Stage Least Square</i> (2SLS)	<ul style="list-style-type: none"> - GDP (<i>Gross Domestic Product</i>) dan nilai tukar secara positif dan signifikan mempengaruhi Permintaan kredit UMKM di Indonesia. - suku bunga kredit perbankan dan inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM di Indonesia. - DPK dan LDR secara positif dan signifikan mempengaruhi Penawaran kredit UMKM di Indonesia. - CAR dan NPL berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit UMKM di Indonesia. - Suku bunga kredit perbankan pengaruhnya tidak signifikan terhadap penawaran kredit UMKM di Indonesia.

3.	Billy Arma Pratama, 2010	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)	Variabel Dependen: Kredit Perbankan Variabel Independen: DPK, CAR, NPL, SBI	Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> - DPK berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kredit. - CAR berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel kredit. - NPL berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel kredit. - Suku bunga SBI tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kredit.
4.	Irma Anindita, 2011	Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, CAR, NPL, dan LDR terhadap Penyaluran Kredit UMKM (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Periode 2003-2010)	Variabel Dependen: Kredit UMKM Variabel Independen: Suku Bunga Kredit, CAR, NPL UMKM, ROA	Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Secara simultan CAR, LDR, NPL, dan suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. - Secara parsial CAR, NPL, dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. - LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.

STIE BPD Jateng

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan definisi yang diberikan untuk mengetahui gambaran dan topik penelitian yang akan diteliti. Konsep-konsep yang akan dikemukakan dalam penelitian ini berkaitan dengan definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kredit UMKM

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah).

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana yang dihimpun dari masyarakat terdiri dari tiga macam rekening yaitu rekening tabungan (*saving deposit*), rekening simpanan berjangka (*time deposit*), dan rekening giro (*deman deposit*). Selain itu terdapat pula sumber dana lain yang sifatnya tidak langsung atau berupa pengendapan dana bank yang didapatkan melalui pemberian jasa bank berupa setoran jaminan dan dana transfer (Ade Arthesa, 2009: 63).

3. *Non Performing Loan* (NPL)

NPL (*Non Performing Loan*) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank (Luh Gede Meydianawathi, 2007).

4. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

LDR merupakan perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan dibanding dengan simpanan masyarakat (Mudrajad Kuncoro, 2002: 285). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, angka LDR seharusnya berada di sekitar 78% - 100% .

5. Inflasi

Inflasi dinyatakan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (www.bi.go.id). Inflasi adalah indikator untuk melihat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

3.2 Definisi Operasional

Menurut Sekaran (2006: 240), definisi operasional adalah definisi sebuah ide dalam istilah yang bisa diukur dengan mengurangi tingkat abstraksinya melalui penggambaran dimensi dan elemennya.

1. Kredit UMKM

Kredit UMKM merupakan posisi neto kredit UMKM yang diberikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Variabel ini dinyatakan dalam satuan Rupiah.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Formula Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu:

$$\text{DPK (masyarakat dan bank)} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

3. *Non Performing Loan* (NPL)

Formula *Non Performing Loan* (NPL) yaitu:

$$\text{NPL} = \frac{\text{(Kredit dalam kategori kurang lancar, diragukan, macet)}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

4. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Formula *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yaitu:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

5. Inflasi

Inflasi termasuk variabel yang mempengaruhi posisi kredit UMKM dari sisi permintaan. Inflasi yang tinggi akan membuat permintaan kredit UMKM menurun. Selain karena inflasi yang tinggi berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga permintaan kredit konsumsi akan menurun pula. Mengingat kredit sektor UMKM belakangan ini didominasi oleh kredit konsumsi, tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap permintaan kredit UMKM.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 61). Dalam

penelitian ini populasinya menggunakan Bank Pembangunan Daerah (BPD)-SI pada tahun 2008 hingga 2011 yang berjumlah 26 bank.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2007: 62). Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun kriteria dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten selama 5 tahun terakhir (tahun 2008-2011).

Dalam penelitian ini, populasi yang dijadikan objek pengamatan berjumlah 26 BPD. Jumlah tersebut didapat dengan menyesuaikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 23 BPD. Adapun 3 BPD yang tidak masuk kedalam kriteria tersebut adalah Bank DKI, Bank Kalbar, dan Bank Sulsel.

Tabel 3.1**Nama bank Pembangunan Daerah (BPD) yang Menjadi Sampel**

No.	Nama BPD	Propinsi
1.	Bank BPD Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam
2.	Bank Sumut	Sumatera Utara
3.	Bank Nagari	Sumatera Barat
4.	Bank Riau Kepri	Riau
5.	Bank Jambi	Jambi
6.	Bank Bengkulu	Bengkulu
7.	Bank Sumsel Babel	Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
8.	Bank Lampung	Lampung
9.	Bank BJB	Banten dan Jawa Barat
10.	Bank Jateng	Jawa Tengah
11.	Bank BPD DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
12.	Bank Jatim	Jawa Timur
13.	Bank BPD Bali	Bali
14.	Bank NTB	Nusa Tenggara Barat
15.	Bank NTT	Nusa Tenggara Timur
16.	Bank Kaltim	Kalimantan Timur
17.	Bank Kalteng	Kalimantan Tengah
18.	Bank Kalsel	Kalimantan Selatan
19.	Bank Sulut	Sulawesi Utara
20.	Bank BPD Sulteng	Sulawesi Tengah
21.	Bank BPD Sultra	Sulawesi Tenggara
22.	Bank Maluku	Maluku Utara
23.	Bank Papua	Papua

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan Bank Pembangunan Daerah (BPD)

yang dipublikasikan melalui situs resmi Bank Indonesia dengan alamat situs www.bi.go.id dan melalui media tertulis berupa Laporan Bulanan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mempelajari, memahami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data-data yang dikumpulkan adalah kredit UMKM, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan Inflasi yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, pengukuran *skewness* dan *kurtosis* untuk menggambarkan distribusi data apakah normal atau tidak (Duwi Priyatno, 2010: 12).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian analisis regresi berganda dalam menguji hipotesis pada penelitian ini haruslah menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel

kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Imam Ghazali, 2009: 147).

a. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai *kurtosis* dan *skewness* dari residual. Selain itu uji statistik dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Ada cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya yang telah di *studentized*) (Imam Ghozali, 2009: 126).

Dasar pengambilan keputusan yang terkait dengan *scatter plot* tersebut adalah:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Menganalisis dengan *scatter plot* memiliki kelemahan yang cukup signifikan, dikarenakan jumlah pengamatan yang akan mempengaruhi hasil plotting. Karena semakin sedikit jumlah pengamatan maka akan sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Untuk itu dapat diperkuat dengan penambahan uji statistik yaitu dengan menggunakan Uji Glejser.

Uji Glejser ini dilakukan dengan meregres nilai *absolute* residual terhadap variabel independen. Analisis ini dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen nilai *absolute*. Jika variabel independen yang signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen nilai *absolute* (probabilitas signifikansinya di atas kepercayaan 5%) maka mengindikasikan tidak terjadi Heteroskedastisitas.

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi linear antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya Multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2009: 95).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individual/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya (Imam Ghozali, 2009: 99).

Pada data cross section (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya

autokorelasi, yaitu Uji Durbin – Watson (DW test). Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H₀ : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

Jika $0 < d < d_l$, maka H₀ ditolak yaitu H₀ tidak ada autokorelasi positif.

Jika $d_l \leq d < d_u$, maka H₀ *no decision* yaitu H₀ tidak ada autokorelasi positif.

Jika $4 - d_l < d < 4$, maka H₀ ditolak yaitu H₀ tidak ada korelasi negatif.

Jika $4 - d_u < d < 4 - d_l$, maka H₀ *no decision* yaitu H₀ tidak ada korelasi negatif.

Jika $d_u < d < 4 - d_u$, maka H₀ tidak ditolak yaitu H₀ tidak ada autokorelasi, positif atau negatif (Imam Ghazali, 2009: 100)

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif (Duwi Priyatno, 2010: 61). Dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hal ini disebabkan penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh, arah dan kekuatan hubungan dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 \text{ DPK} + b_2 \text{ NPL} + b_3 \text{ LDR} + b_4 \text{ Inflasi} + e$$

Keterangan:

Y = Kredit UMKM

a = konstanta regresi

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = koefisien regresi

DPK = Dana Pihak Ketiga
NPL = Non Performing Loan
LDR = Loan to Deposit Ratio
Inflasi = Inflasi
e = *error*

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji t (Pengaruh Secara Parsial)

Tujuan penggunaan uji t adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) (Duwi Priyatno, 2010: 68).

Pengujian ini dilakukan dengan uji t atau t-test, yaitu membandingkan antar t hitung dengan t-tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat:

- Jika $t\text{-tabel} < t\text{-hitung}$ maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikan t pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%).

Analisis didasarkan pada perbandingan antara signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05 dimana syaratnya adalah sebagai berikut:

- Jika signifikansi $t < 0,05$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel independennya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika signifikansi $t > 0,05$, maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Atau sama hal dengan tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen (DPK, NPL, LDR, Inflasi) mempengaruhi variabel dependen (kredit UMKM) secara signifikan.

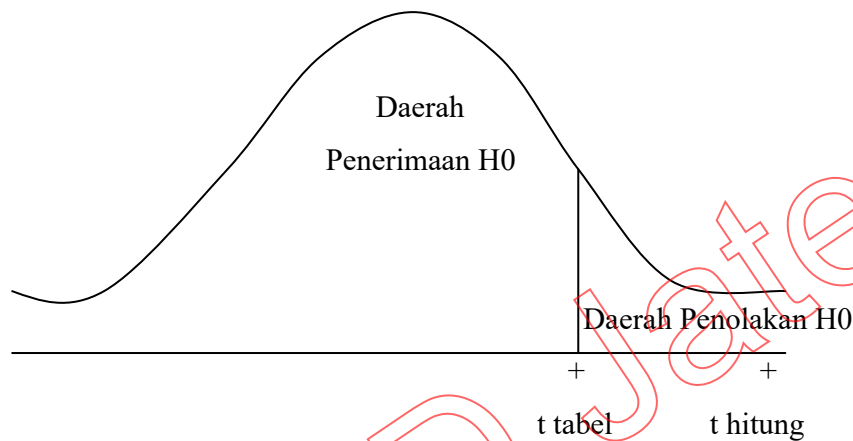
$H_0 : \beta = 0$ tidak ada pengaruh antara DPK terhadap kredit UMKM secara parsial.

$H_a : \beta > 0$ ada pengaruh positif dan signifikan antara DPK terhadap kredit UMKM secara parsial.

$H_0 : \beta = 0$ tidak ada pengaruh antara LDR terhadap kredit UMKM secara parsial.

$H_a : \beta > 0$ ada pengaruh positif dan signifikan antara LDR terhadap kredit UMKM secara parsial.

Grafik pengujian hipotesis sebagai berikut :



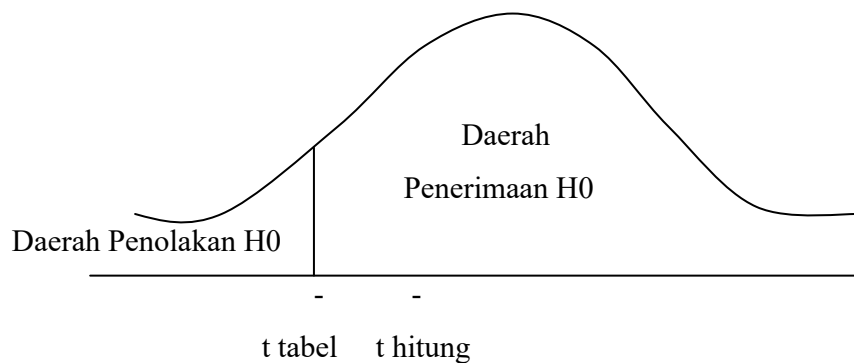
$H_0 : \beta = 0$ tidak ada pengaruh antara NPL terhadap kredit UMKM secara parsial.

$H_a : \beta < 0$ ada pengaruh negatif dan signifikan antara NPL terhadap kredit UMKM secara parsial.

$H_0 : \beta = 0$ tidak ada pengaruh antara Inflasi terhadap kredit UMKM secara parsial.

$H_a : \beta < 0$ ada pengaruh negatif dan signifikan antara Inflasi terhadap kredit UMKM secara parsial.

Grafik pengujian hipotesis sebagai berikut :



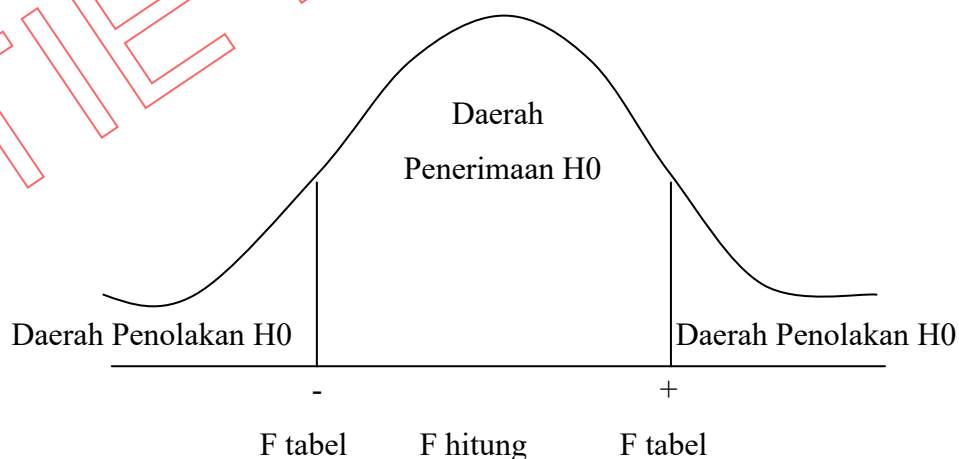
3.6.2 Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi dependen secara signifikan. Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat:

- a. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima yaitu variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak yaitu variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi F pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Pada analisis didasarkan pada perbandingan antara signifikansi 0,05 dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Jika signifikansi $F < 0,05$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansi $F > 0,05$, maka H_0 diterima yaitu variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



3.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen (Duwi Priyatno, 2010: 66).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Obyek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2008-2011 yang berjumlah 26 BPD. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 23 BPD sebagai sampel penelitian.

4.1.1 Bank BPD Aceh

Bank BPD Aceh didirikan pada tanggal 1 April 1958 yang awalnya bernama NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA). Pada tahun 1962 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. “NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)” harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang dimaksud. Tanggal 17 April 1973 menetapkan pelaksanaan pengalihan “NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)” menjadi “Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)”. Secara resmi pengalihan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 1973, yang kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk menindak lanjuti pelaksanaan Undang-undang tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan Nomor 8 Tahun 1992 tentang penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, antara lain memberi kebebasan kepada Bank Pembangunan Daerah untuk memilih salah satu dari empat bentuk badan hukum. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh memilih bentuk hukum sebagai Perusahaan Daerah sehingga menjadi “PD. Bank

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA) pada tanggal 5 Februari 1993. Perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh kembali dilakukan karena bentuk badan hukum sebagai Perusahaan Daerah dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi perbankan saat ini, maka untuk mendukung gerak dan kinerja Bank, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Perbankan di tanah air, Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh memilih bentuk badan hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT), dengan demikian nama Bank berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat “Bank BPD Aceh” pada tanggal 7 Mei 1999.

4.1.2 Bank Sumut

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, disingkat PT. Bank Sumut (selanjutnya disebut "Bank Sumut"). Bank didirikan tanggal 4 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999 kembali menjadi Perseroan Terbatas.

4.1.3 Bank Nagari

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat”. Berdasarkan Undang-Undang No.13 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 4. Sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi “Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat”. Dalam perjalanannya tahun 1996 melalui Perda No. 2 / 1996 disahkan penyebutan nama (*Call Name*) sebagai ”Bank Nagari” dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun *brand image* sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat. Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis.

Tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat No. 3 Tahun 2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah.

4.1.4 Bank Riau Kepri

Sejarah berdirinya Bank Pembangunan Daerah Riau yang sekarang dikenal dengan Bank Riau Kepri merupakan kelanjutan dari kegiatan usaha dari PT. BAPERI (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan tanggal 12 Agustus 1961. Selanjutnya tanggal 1 April 1966 dinyatakan berakhir segala kegiatan PT. BAPERI. Seluruh aktiva dan pasiva PT. BAPERI dilebur kedalam Bank Pembangunan Daerah Riau yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau. Kemudian sesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 dan dengan Perda No. 10 tahun 2002 tanggal 26 Juni 2002 serta dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 36 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Ham dengan Surat Keputusan No. C-09851.HT.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003 dan persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003, status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi berbadan hukum PT.

4.1.5 Bank Jambi

Bank Jambi merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi yang didirikan tanggal 12 Februari 1959 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah maka seluruh Bank Pembangunan Daerah di setiap provinsi di Indonesia wajib menyesuaikan ketentuannya. Tanggal 25 September

1964, PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan spesifikasi kegiatannya sebagai Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan aturan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1962. Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diwajibkan seluruh bank komersial untuk menyesuaikan kembali ketentuan pendiriannya. Bank Pembangunan Daerah Jambi berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT). Kemudian Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut Bank Jambi pada tanggal 1 Februari 2007 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. W20-00061 HT.01.01-TH.2007 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2007 serta Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.9/59/KEP.GBI/2007 tanggal 13 November 2007. Bidang usaha Bank Jambi meliputi seluruh kegiatan bank umum, termasuk sebagai Pemegang Kas Daerah yang berfungsi melaksanakan dan mengelola penyimpanan, penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta mengutamakan pembiayaan bidang proyek Pembangunan Daerah.

4.1.6 Bank Bengkulu

Bank Pembangunan Daerah Bengkulu didirikan pada tanggal 9 Agustus 1969. Selanjutnya dalam rangka memberdayakan BPD guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, maka pemerintah melaksanakan program rekapitalisasi terhadap BPD, termasuk Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Dengan memperhatikan kondisi perbankan pada saat itu kurang baik, maka untuk meningkatkan kinerja Bank Pembangunan Daerah Bengkulu telah diikuti sertakan dalam rekapitalisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, BPD Bengkulu yang mengikuti program rekapitalisasi diharuskan merubah bentuk hukumnya dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT), yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu atau disingkat menjadi Bank Bengkulu pada tanggal 1 Mei 1999. Selanjutnya dilakukan perjanjian bersama antara Pemerintah Republik Indonesia, PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dan Bank Indonesia pada tanggal 7 Mei 1999.

Penyertaan modal pemerintah pusat dalam rangka program rekap dimaksud telah diselesaikan Bank Bengkulu pada tahun 2004 yang lalu.

4.1.7 Bank Sumsel Babel

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung didirikan pada tanggal 6 November 1957 dengan nama PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan. Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah, maka terhitung sejak tahun 1962, secara resmi seluruh kegiatan PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan menjadi milik Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan dengan status badan hukum perusahaan Daerah. Setelah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan dan sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000, Bank Sumsel mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Persero Terbatas. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 tanggal 3 November 2009 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-56914.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 20 November 2009, maka Bank Sumsel berubah nama menjadi Bank Sumsel Babel.

4.1.8 Bank Lampung

Bank Lampung (PD. Bank Pembangunan Lampung) yang resmi beroperasi tanggal 31 Januari 1966. Kemudian Bank Pembangunan Daerah Lampung merubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-8058 H.01.04 Tahun 2001 tanggal 6 Mei 1999. Sejalan dengan perkembangan kegiatan perekonomian dan perbankan, guna meningkatkan permodalan bank, daya saing, perluasan produk dan usaha bank serta dalam rangka memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilikan saham, dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai Bank Umum

dan pemegang Kas Daerah, Guna mensinergikan kedua sisi tersebut, Bank Lampung telah mencanangkan visi dan misi sebagai dasar pegelolaan operasional bank, yaitu "Bersama Meraih Sukses" yang kemudian kristalisasi nilainya dijabarkan dalam butir-butir perilaku Budaya Perusahaan Bank Lampung.

4.1.9 Bank BJB

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00. Selanjutnya tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan "Bank Jabar" dengan logo baru. Pada tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah. Pada tanggal 29 November 2007

nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (*call name*) Bank Jabar Banten. Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010, sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo serta Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010, maka perseroan telah resmi berubah menjadi “Bank bjb”.

4.1.10 Bank Jateng

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah beroperasi pada tahun 1963. Seiring dengan terus berkembangnya perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen Bank Jateng berkeinginan untuk mengubah logo dan *call name* perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Jateng. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005 maka nama sebutan (*call name*) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.

4.1.11 Bank BPD DIY

Bank BPD DIY didirikan pada tanggal 15 Desember 1961. berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian. Saat ini, landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank BPD DIY

merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum.

4.1.12 Bank Jatim

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

4.1.13 Bank BPD Bali

Bank Pembangunan Daerah Bali didirikan pada tanggal 5 Juni 1962. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Pokok Bank Pembangunan Daerah Bali maka akta notaris tersebut dibatalkan dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6/DPR.DGR/1965 Tanggal 9 Februari 1965 didirikanlah “Bank Pembangunan Daerah Bali” dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah. Perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Akta Pendirian Nomor

7 tanggal 12 Mei 2004, yaitu “PT. Bank Pembangunan Daerah Bali” atau disingkat PT Bank BPD Bali. Pada tahun 2004 aktivitas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali ditingkatkan dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 6/32/KEP.DGS/2004 tanggal 11 Nopember 2004. Untuk meningkatkan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Bali modal dasar awal pendirian adalah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Pada tahun 2008 berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 tentang RUPS tahunan. Tanggal 25 Mei 2010 menetapkan modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).

4.1.14 Bank NTB

Bank NTB mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964. Rekrutmen karyawan pertama berjumlah 10 orang. Modal disetor awal pendirian bank sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat yang kemudian berkembang sampai dengan 31 Desember 2011 menjadi Rp. 253.091 juta. Seiring dengan berjalannya waktu, Bank NTB terus berkembang hingga memiliki Kantor yang berjumlah 29 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 1 kantor cabang utama, 8 kantor cabang, 11 kantor cabang pembantu, 3 kantor kas dan 5 *payment point*. Guna mendukung kualitas pelayanan, PT. Bank NTB memiliki 70 ATM yang tersebar diseluruh Kota/Kabupaten se- NTB. Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999.

4.1.15 Bank NTT

Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur merupakan bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kota / Kabupaten se - Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya tanggal 18 Oktober 1961 berdirilah suatu Lembaga Keuangan di Nusa Tenggara Timur dengan nama PT. Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan mulai melakukan kegiatannya sebagai bank pada tanggal 17 Juli 1962. Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perubahan status hukum Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Daerah (PD). Dalam rangka mengikuti program rekapitalisasi, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Mendagri No.1 Tahun 1998 tertanggal 4 Februari 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah. Pada momentum inilah status badan hukum PD. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan lagi menjadi Perseroan Terbatas. Sehubungan dengan perubahan badan hukum tersebut di atas dan dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang modal minimum bank umum, maka selanjutnya ditetapkan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang di singkat dengan sebutan Bank NTT. Modal dasar ditetapkan sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah). Modal Dasar Bank NTT terus mengalami peningkatan dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) menjadi Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar Rupiah). Saat ini modal dasar BankNTT sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah).

4.1.16 Bank Kaltim

Bank Kaltim adalah salah satu Perusahaan Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim yang didirikan tanggal 14 Oktober 1965. Keberadaan BPD Kaltim didirikan adalah dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian & pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sehingga terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera. Sejalan waktu, BPD Kaltim makin berkembang. Sejumlah sektor usaha mulai dilirik untuk digarap. Namun payung hukum yang ada, membatasi ruang gerak BPD Kaltim untuk berkembang dinamis. Antisipasinya dilakukan pemilik, yakni Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim, yang mengusulkan kembali

perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kaltim. Tanggal 26 April 2006 lahirlah Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. Dengan landasan hukum terbaru Perda Nomor 2 Tahun 2006 disertai surat BI No. 5/48/KEP.DGS/2003 tanggal 13 Nopember 2003, BPD Kaltim meningkatkan status operasionalnya menjadi Bank Umum Devisa. Selanjutnya berdasarkan Ijin Prinsip dan Ijin Operasional dari Bank Indonesia tertuang dalam surat BI Nomor 8/5/DS/Smr tanggal 27 November 2006 serta surat BI Nomor 8/7/DS/Smr tanggal 22 Desember 2006, BPD Kaltim melaksanakan kegiatan Usaha Syariah yang resmi beroperasi tanggal 27 Desember 2006. Unit Syariah BPD Kaltim itu diberi nama BPD Kaltim Syariah, saat ini berkantor di Jl. Jend. A Yani Samarinda.

4.1.17 Bank Kalteng

Tanggal 28 Oktober 1961 secara resmi telah berdiri PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah yang menetapkan antara lain bahwa Bank Pembangunan Daerah harus didirikan dengan Peraturan Daerah (Perda). dengan demikian maka tanggal 2 Maret 1965 berubah nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang sebagian besar sahamnya masih dimiliki oleh swasta (Saham Pendiri). Pada tanggal 25 Maret 1992 dikeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menetapkan bahwa Bank Pembangunan Daerah menjadi Bank Umum yang memiliki fungsi komersial, namun BPD Kalimantan Tengah tetap menjalankan misi pembangunan dan fungsi sebagai Bendaharawan dan Pemegang Kas Daerah Kalimantan Tengah. Pada pertengahan tahun 1999, perubahan bentuk badan hukum BPD Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

4.1.18 Bank Kalsel

PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel atau yang dikenal dengan Bank Kalsel adalah sebuah bank yang berdiri pada tahun [1964](#). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah Bank milik Pemerintah Provinsi [Kalimantan Selatan](#) bersama-sama dengan Pemerintah Kota/ Kabupaten Se-Kalimantan Selatan dan didirikan pada tanggal 25 Maret [1964](#) atas dasar Peraturan Daerah Tingkat I [Kalimantan Selatan](#) Nomor 4 tahun [1964](#), berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun [1962](#) tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) serta memperoleh ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur [Bank Indonesia](#) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret [1965](#). Seiring perjalanan waktu, guna penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi, telah dilakukan beberapa kali pergantian [Peraturan Daerah](#). Saat ini landasan hukum yang mengatur pendirian Bank BPD Kalsel adalah Peraturan Daerah Propinsi [Kalimantan Selatan](#) Nomor 11 Tahun [2008](#), dimana modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).

4.1.19 Bank Sulut

Bank Sulut dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara didirikan dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah tanggal 13 Oktober 1961. Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp 100 milyar dengan kepemilikan daerah propinsi, kabupaten dan kota pemegang saham Seri A maksimum sebesar 55% dan pemegang saham seri B bersama-sama dengan pihak ketiga termasuk koperasi maksimum sebesar 45%. Saham-saham terbagi atas Saham Seri A sebanyak 550.000 nilai nominal @ Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Saham Seri B sebanyak 450.000 nilai nominal @ Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Setelah Bank Sulut melepaskan diri dari program rekapitalisasi perbankan terjadi beberapa perubahan anggaran dasar berkaitan dengan perubahan susunan kepemilikan saham setelah divestasi saham negara,

dan terakhir dengan peningkatan modal dasar dari Rp. 100 milyar menjadi Rp. 300 milyar pada tanggal 23 Agustus 2006.

4.1.20 Bank Sulteng

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah didirikan tanggal 13 April 1969, dan dibuka secara resmi tahun 1970, setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15.6.1.17 tanggal 2 Januari 1970.

4.1.21 Bank BPD Sultra

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara didirikan pada tanggal 2 Maret 1968. BPD Sultra terdiri atas 20 kantor, yaitu 1 kantor pusat non operasional, 6 kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu, 3 kantor kas, serta 20 Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Sampai dengan 31 Desember 2011 BPD Sultra memiliki 351 orang pegawai.

4.1.22 Bank Maluku

Bank Maluku didirikan pertama kali pada tanggal 25 Oktober 1961 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Maluku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha Bank Pembangunan Daerah Maluku diubah menjadi Badan Usaha milik Daerah (BUMD). kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 5 Tahun 1990, jumlah modal dasar Bank Pembangunan Daerah Maluku diubah menjadi sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah). Dengan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka tanggal 29 Juni 1999, bentuk badan hukum bank Pembangunan Daerah Maluku diubah dari Perusahaan daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

4.1.23 Bank Papua

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irian Jaya, didirikan pada tanggal 13 April 1966. Selanjutnya telah beberapa kali terjadi perubahan Peraturan Daerah dan yang terakhir Perda. Nomor 7 tahun 1996 terdapat

perubahan modal dasar bank menjadi Rp 50 miliar. Kemudian Keputusan RUPS Nomor: 05/SK/RUPS-BPD/XII/2000 telah diputuskan untuk mengubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Jaringan operasional PT. Bank Papua tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk memberikan layanan bagi para nasabah. Jaringan kantor PT. Bank Papua sampai saat ini sebanyak 71 kantor dan 21 ATM dan tergabung dengan Jaringan ATM Bersama dengan jumlah peserta sebanyak 64 bank dengan 7500 lebih ATM dan Jaringan ATM Prima dengan jumlah 29 bank dengan jaringan 6500 lebih ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.2.1 Metode Analisis Data

4.2.1.1 Analisis Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dalam variabel penelitian (DPK, LDR, NPL, dan Inflasi) yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi). (Ghozali, 2009:19). Hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat di lihat dari tabel dibawah ini :

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	92	607,548	37,008,489	6,997,154.78	6,889,014.923
NPL	92	.57	44.24	9.8275	10.60166
LDR	92	22.35	127.10	77.6793	18.87267
Inflasi	92	2.78	11.06	6.1475	3.24611
Valid N (listwise)	92				

Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2012.

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil uji analisis deskriptif pada DPK. Nilai terendah pada DPK sebesar Rp 607.548 Bank Sulteng. Nilai tertinggi sebesar Rp 37.008.489 Bank BJB. Nilai rata-rata sebesar Rp 6.997.154,78 dengan standar deviasi sebesar Rp 6.889.014,923.

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil uji analisis deskriptif pada kualitas aktiva suatu bank yang diukur dengan rasio NPL. Nilai terendah pada rasio NPL sebesar 0,57% Bank Jatim. Nilai tertinggi sebesar 44,24% Bank Bengkulu. Nilai rata-rata sebesar 9,8275% dengan standar deviasi sebesar 10,60166%.

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil uji analisis deskriptif pada likuiditas suatu bank yang diukur dengan rasio LDR. Nilai terendah pada rasio LDR sebesar 22,35% Bank Sultra. Nilai tertinggi sebesar 127,10% Bank NTB. Nilai rata-rata sebesar 77.6793% dengan standar deviasi sebesar 18.87267%.

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil uji analisis deskriptif pada tingkat inflasi suatu bank. Nilai terendah inflasi sebesar 2,78%. Nilai tertinggi sebesar 11,06%. Nilai rata-rata sebesar 6,1475% dengan standar deviasi sebesar 3,24611%.

4.2.1.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal ataukah tidak dengan analisis grafik atau uji statistik. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik yaitu dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorv-Smirnov (K-S). Hasil uji statistik dalam penelitian ini dapat terlihat pada gambar dibawah ini :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1480842,02439
Most Extreme Differences	Absolute	,763
	Positive	,173
	Negative	-,126
Kolmogorov-Smirnov Z		1,661
Asymp. Sig. (2-tailed)		,008

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

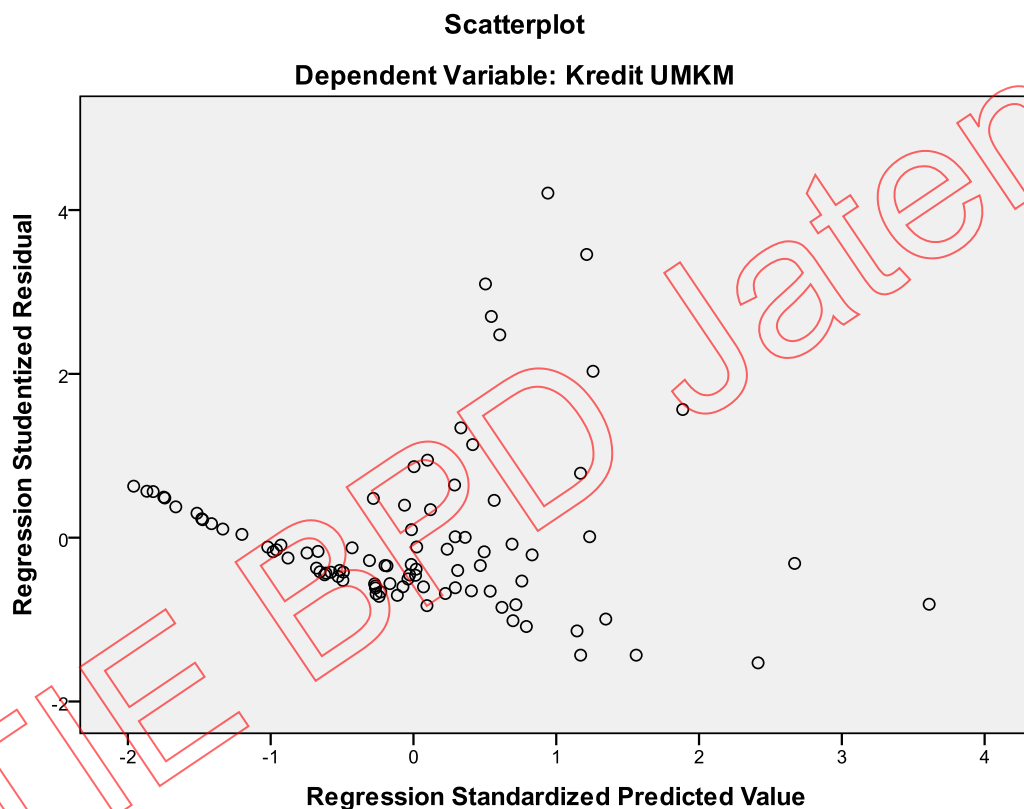
Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2012.

Dari output di atas pada kolom Kolmogorov-Smirnov besar nilainya adalah 1,661 dan nilai signifikansi untuk kredit UMKM, DPK, NPL, LDR, dan Inflasi sebesar 0,008. Karena signifikansi untuk seluruh variabel lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa populasi data kredit UMKM, DPK, NPL, LDR, dan Inflasi tidak memenuhi asumsi normalitas.

4.2.1.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dinilai terjadi Homoskedastisitas dan jika berbeda dinilai terjadi Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastis atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Ada cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2012.

dari grafik *scatter plot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas.

4.2.1.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Model regresi yang tidak terjadi multikolinieritas jika angka *tolerance* di atas ($>$) 0,1 dan VIF di bawah ($<$) 10. Hasil pengujian dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-184846,194	907681,486		-,204	,839		
DPK	,133	,026	,483	5,157	,000	,804	1,244
NPL	-46721,333	16091,211	-,262	-2,904	,005	,866	1,155
LDR	17932,696	8824,772	,179	2,032	,045	,909	1,100
Inflasi	-40276,778	49886,448	-,069	-,807	,422	,961	1,040

a. Dependent Variable: Kredit UMKM

Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2012.

Dari *output Coefficients* yang terdapat pada lampiran, dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk DPK adalah 1,244, NPL sebesar 1,155, LDR sebesar 1,100, dan Inflasi sebesar 1,040. Karena nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas.

4.2.1.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Konsekuensi adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah *variance* sampel tidak dapat menggambarkan *variance* populasinya. Sehingga model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel tertentu. Untuk mendiagnosisnya digunakan uji Durbin – Watson (*DW test*). Hipotesis yang akan diuji adalah:

H₀ : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

(Imam Ghozali, 2009: 100)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,622 ^a	,387	,359	1,514,501.823	1,713

a. Predictors: (Constant), Inflasi, NPL, LDR, DPK

b. Dependent Variable: Kredit UMKM

Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2012.

Hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,713. Jumlah sampel 92 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k = 4), maka di tabel Durbin-Watson diperoleh nilai batas bawah (dl) sebesar 1,5713 dan batas atas (du) sebesar 1,7523. Oleh karena nilai DW lebih kecil dari batas atas (du) dan kurang dari $4 - 1,7523$ ($4 - du$) serta $dl \leq d \leq du$, maka dapat disimpulkan H₀ diterima yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi.

4.2.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan

beberapa variabel independen. Tujuan analisis regresi berganda adalah menggunakan nilai-nilai variabel independen yang diketahui untuk meramalkan nilai variabel dependen. Adapun hasil dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-184846,194	907681,486		-,204	,839
	DPK	,133	,026	,483	5,157	,000
	NPL	-46721,333	16091,211	-,262	-2,904	,005
	LDR	17932,696	8824,772	,179	2,032	,045
	Inflasi	-40276,778	49886,448	-,069	-,807	,422

a. Dependent Variable: Kredit UMKM

Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2012.

Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,483 \text{ DPK} - 0,262 \text{ NPL} + 0,179 \text{ LDR} - 0,069 \text{ Inflasi.}$$

Persamaan regresi di atas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi variabel DPK (X_1) sebesar 0,483 artinya jika DPK mengalami kenaikan Rp 1 maka kredit UMKM (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Rp 0,483 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara DPK dengan kredit UMKM. Pengaruhnya terhadap kredit yaitu apabila sumber dana mencukupi maka dana dapat disalurkan kembali kepada masyarakat. Sehingga semakin naik DPK, maka semakin meningkat kredit UMKM.
2. Koefisien regresi variabel NPL (X_2) sebesar -0,262 artinya jika NPL mengalami kenaikan 1% maka kredit UMKM (Y) akan mengalami penurunan

sebesar Rp 0,262 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara NPL dengan kredit UMKM. Pengaruhnya terhadap kredit yaitu apabila keadaan nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank maka penyaluran kredit menjadi tidak optimal. Karena NPL merupakan cermin risiko kredit. Sehingga semakin naik NPL, maka semakin menurun kredit UMKM.

3. Koefisien regresi variabel LDR (X_3) sebesar 0,179 artinya jika LDR mengalami kenaikan 1% maka kredit UMKM (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Rp 0,179 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara LDR dengan kredit UMKM. Pengaruhnya terhadap kredit yaitu semakin tinggi rasio likuiditas memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Sehingga semakin naik LDR, maka semakin meningkat kredit UMKM.
4. Koefisien regresi variabel Inflasi (X_4) sebesar -0,069 artinya jika Inflasi mengalami kenaikan 1% maka kredit UMKM (Y) akan mengalami penurunan sebesar Rp 0,069 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Inflasi dengan kredit UMKM. Semakin naik Inflasi, maka semakin turun kredit UMKM.

4.2.2 Pengujian Hipotesis

4.2.2.1 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah regresi yang diperoleh itu berpengaruh positif, negatif atau tidak berpengaruh serta menentukan apakah hipotesis yang diajukan berhasil ditolak atau tidak dapat

ditolak. Sementara itu secara parsial pengaruh dari empat variabel independen tersebut terhadap kredit dipaparkan pada tabel berikut:

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-184846,194	907681,486		-,204	,839
	DPK	,133	,026	,483	5,157	,000
	NPL	-46721,333	16091,211	-,262	-2,904	,005
	LDR	17932,696	8824,772	,179	2,032	,045
	Inflasi	-40276,778	49886,448	-,069	-,807	,422

a. Dependent Variable: Kredit UMKM

Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2012.

4.2.2.1.1 Pengujian Koefisien Regresi Variabel DPK terhadap Kredit UMKM

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

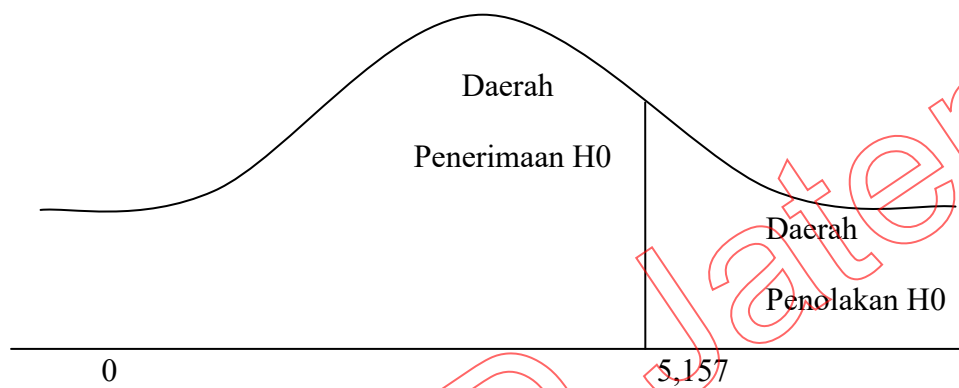
1. Bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $b_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka hipotesis alternatif dapat diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Taraf nyata 5% atau 0,05 dan $N=92$ dk 4. Berdasarkan hasil perhitungan pada pengujian t dengan tingkat signifikansi 5% dan nilai t adalah 1,988. Diketahui nilai t test untuk variabel DPK adalah $5,157 > 1,988$ pada taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa:

$H_0 : \beta = 0$ tidak ada pengaruh antara DPK terhadap kredit UMKM secara parsial.

$H_a : \beta > 0$ ada pengaruh positif dan signifikan antara DPK terhadap kredit UMKM secara parsial.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara DPK terhadap kredit UMKM Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara parsial.



Dana pihak ketiga adalah besarnya total simpanan masyarakat yang berada diperebankan yang terdiri dari tabungan, deposito, dan giro. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh suatu bank, bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Faisal, 2005: 35). pengaruhnya terhadap kredit yaitu apabila sumber dana mencukupi maka dana dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, tetapi bank perlu mampu menyalurkan dana dengan efektif agar aktifitas dana yang dikelola dapat terjaga dengan baik.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Billy Arma Pratama (2010) yang menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kredit.

4.2.2.1.2 Pengujian Koefisien Regresi Variabel NPL terhadap Kredit UMKM

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

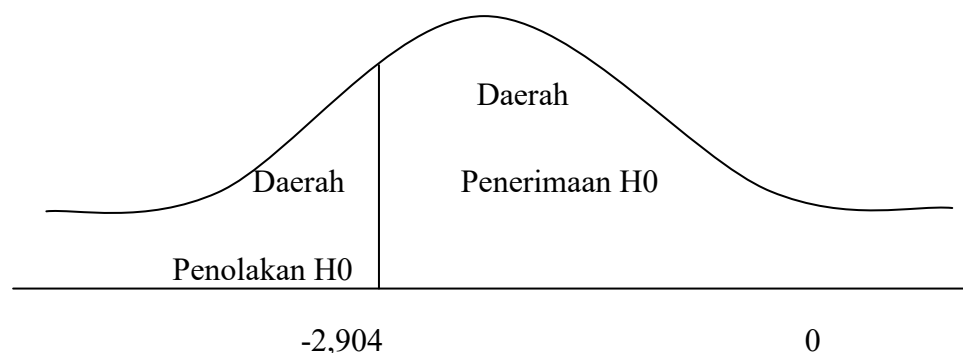
1. Bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka hipotesis alternatif dapat diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Taraf nyata 5% atau 0,05 dan $N=92$ dk 4. Berdasarkan hasil perhitungan pada pengujian t dengan tingkat signifikansi 5% dan nilai t adalah -1,988. Diketahui nilai t test untuk variabel NPL adalah $-2,904 < -1,988$ pada taraf signifikansi $0,005 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa:

$H_0 : \beta = 0$ tidak ada pengaruh antara NPL terhadap kredit UMKM secara parsial.

$H_a : \beta < 0$ ada pengaruh negatif dan signifikan antara NPL terhadap kredit UMKM secara parsial.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh negatif dan signifikan antara NPL terhadap kredit UMKM Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara parsial.



NPL (*Non Performing Loan*) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank (Meydianawathi, 2007). NPL merupakan cermin dari risiko kredit. Semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Pengaruhnya terhadap kredit yaitu apabila keadaan nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank tersebut maka penyaluran kredit menjadi tidak optimal.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irma Anindita (2011) yang menyimpulkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit UMKM.

4.2.2.1.3 Pengujian Koefisien Regresi Variabel LDR terhadap Kredit UMKM

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

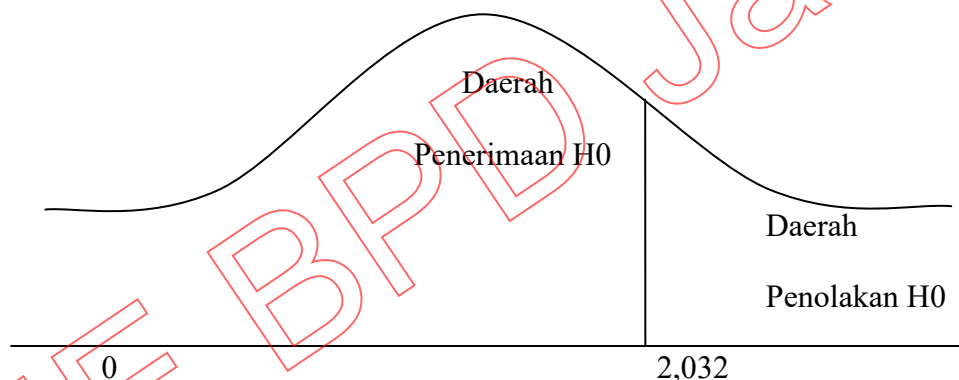
1. Bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $b_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka hipotesis alternatif dapat diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Taraf nyata 5% atau 0,05 dan N=92 dk 4. Berdasarkan hasil perhitungan pada pengujian t dengan tingkat signifikansi 5% dan nilai t adalah 1,988. Diketahui nilai t test untuk variabel LDR adalah 2,032 > 1,988 pada taraf signifikansi 0,045 < 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa:

H₀ : $\beta = 0$ tidak ada pengaruh antara LDR terhadap kredit UMKM secara parsial.

H_a : $\beta > 0$ ada pengaruh positif dan signifikan antara LDR terhadap kredit UMKM secara parsial.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara LDR terhadap kredit UMKM Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara parsial.



Likuiditas menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dan masa yang akan datang (Mudrajad Kuncoro, 2002: 565). Cara untuk mengetahui likuiditas perbankan adalah dengan melihat LDR. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tersebut dapat menilai seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. LDR merupakan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga bank pada saat tertentu. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, angka LDR seharusnya berada di sekitar 78% - 100%. Pengaruhnya terhadap kredit yaitu semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang

bersangkutan. Berarti tidak menutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini disebabkan karena jumlah yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gerry Danisty (2009) yang menyimpulkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit UMKM.

4.2.2.1.4 Pengujian Koefisien Regresi Variabel Inflasi terhadap Kredit UMKM

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

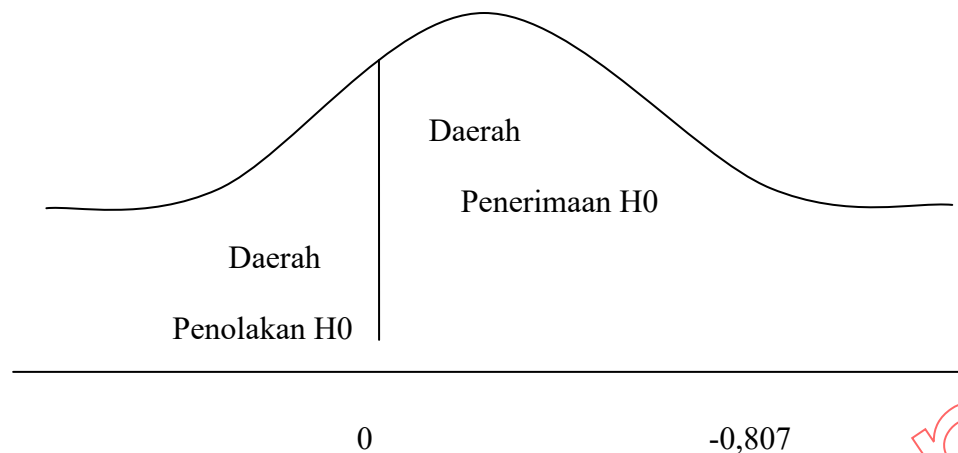
1. Bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka hipotesis alternatif dapat diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Taraf nyata 5% atau 0,05 dan $N=92$ dk 4. Berdasarkan hasil perhitungan pada pengujian t dengan tingkat signifikansi 5% dan nilai t adalah -1,988. Diketahui nilai t test untuk variabel Inflasi adalah $-0,807 > -1,988$ pada taraf signifikansi $0,422 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa:

$H_0 : \beta = 0$ tidak ada pengaruh antara Inflasi terhadap kredit UMKM secara parsial.

$H_a : \beta < 0$ ada pengaruh negatif dan signifikan antara Inflasi terhadap kredit UMKM secara parsial.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara Inflasi terhadap kredit UMKM Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara parsial.



Inflasi dinyatakan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (www.bi.go.id). Inflasi adalah indikator untuk melihat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi (www.wikipedia.org). Inflasi termasuk variabel yang mempengaruhi posisi kredit dari sisi permintaan. Pengaruhnya terhadap kredit yaitu jika inflasi tinggi maka akan menyebabkan penurunan permintaan kredit perbankan.

4.2.2.2 Uji F

Berdasarkan Uji F diperoleh pengaruh secara simultan empat variabel independen DPK, NPL, LDR, dan Inflasi terhadap variabel dependen kredit UMKM sebagai berikut.

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,259E14	4	3,147E13	13,718	,000 ^a
	Residual	1,996E14	87	2,294E12		
	Total	3,254E14	91			

a. Predictors: (Constant), Inflasi, NPL, LDR, DPK

b. Dependent Variable: Kredit UMKM

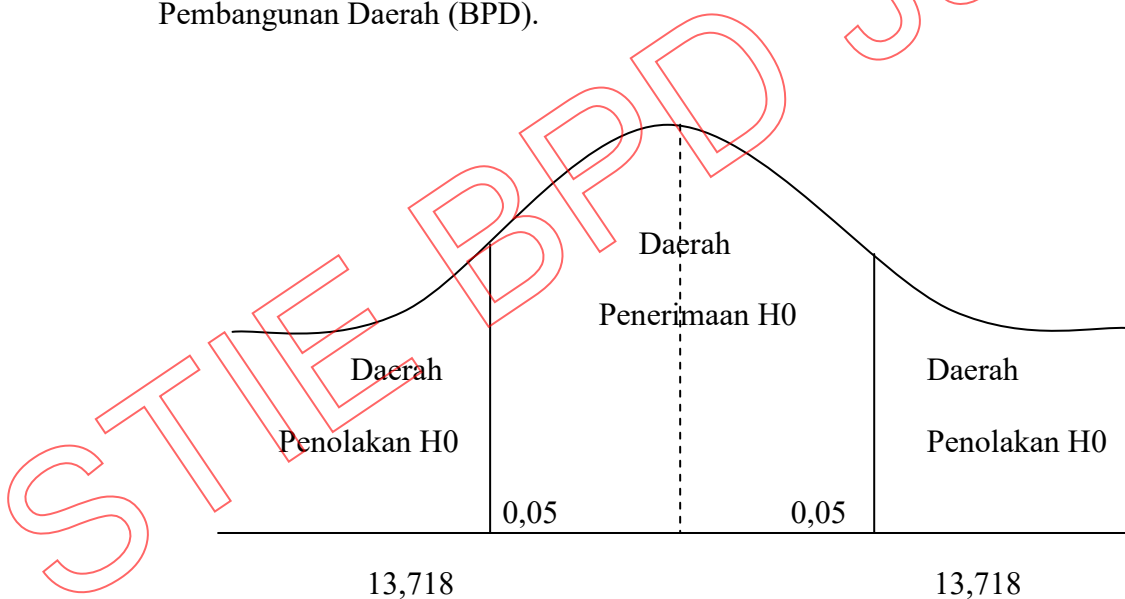
Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2012.

Hasil uji F dapat dilihat pada *output ANOVA* dari hasil analisis regresi berganda di atas. Rumusan hipotesis uji F dalam penelitian ini adalah:

H₀: Tidak ada pengaruh antara DPK, NPL, LDR, dan Inflasi secara simultan terhadap kredit UMKM.

H_a: Ada pengaruh nyata dan signifikan antara DPK, NPL, LDR, dan Inflasi secara simultan terhadap kredit UMKM.

Berdasarkan tabel diperoleh F hitung sebesar 13,718. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, dan df 4 (n-k-1) atau $92-4-1 = 87$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 2,476. Nilai F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel ($13,718 > 2,476$), maka H₀ ditolak. Artinya DPK, NPL, LDR, dan Inflasi secara simultan berpengaruh nyata dan signifikan terhadap kredit UMKM Bank Pembangunan Daerah (BPD).



4.2.3 Analisis Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,622 ^a	,387	,359	1,514,501.823	1,713

a. Predictors: (Constant), Inflasi, NPL, LDR, DPK

b. Dependent Variable: Kredit UMKM

Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2012.

Berdasarkan *output* diperoleh nilai determinasi R^2 (*R Square*) sebesar 0,359 atau (35,9%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (DPK, NPL, LDR, dan Inflasi) terhadap variabel dependen (kredit UMKM) sebesar 35,9% atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (DPK, NPL, LDR, dan Inflasi) mampu menjelaskan sebesar 35,9% variasi dependen (kredit UMKM). Sedangkan sisanya sebesar 64,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti CAR, ROA, suku bunga kredit perbankan, GDP, dan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan Inflasi terhadap kredit UMKM Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada tahun 2008-2011, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil regresi menunjukkan bahwa:
 - a. Variabel DPK (X_1) berpengaruh positif terhadap kredit UMKM (Y).
 - b. Koefisien regresi variabel NPL (X_2) berpengaruh negatif terhadap kredit UMKM (Y).
 - c. Koefisien regresi variabel LDR (X_3) berpengaruh positif terhadap kredit UMKM (Y).
 - d. Koefisien regresi variabel Inflasi (X_4) berpengaruh negatif terhadap kredit UMKM (Y).
2. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa:
 - a. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit UMKM Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sehingga **hipotesis 1 diterima**.
 - b. Variabel *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit UMKM Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sehingga **hipotesis 2 diterima**.

- c. Variabel *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit UMKM Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sehingga **hipotesis 3 diterima**.
- d. Variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap kredit UMKM Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sehingga **hipotesis 4 ditolak**.
- e. Variabel independen yang berupa DPK, NPL, LDR, dan Inflasi secara simultan nyata dan signifikan mempengaruhi variabel dependen yang berupa kredit UMKM Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sehingga **hipotesis 5 diterima**.
- f. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui koefisien determinasi atau adjusted R^2 sebesar 35,9%, kredit UMKM dipengaruhi masing-masing variabel DPK, NPL, LDR, dan Inflasi. Sisanya 64,10% dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel tersebut seperti CAR, ROA, suku bunga kredit perbankan, GDP, dan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar.

5.2 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini ditemukan keterbatasan-keterbatasan penelitian. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain :

1. Periode observasi yang diteliti hanya 4 tahun saja yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.
2. Variabel independen dalam penelitian ini masih terbatas.

5.3 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Saran untuk obyek penelitian

Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya sebagai bank, harus senantiasa meningkatkan kinerjanya khususnya dalam hal penyaluran kredit UMKM. Namun Relatif tingginya

pertumbuhan kredit BPD masih tidak terfokus pada penyaluran kredit produktif dan cenderung menyalurkan kredit konsumtif yang menyebabkan belum optimalnya peran BPD dalam pembiayaan sektor riil di daerah. Melihat kondisi tersebut berarti masih ada kesempatan bagi BPD untuk terus meningkatkan penyaluran kreditnya kepada masyarakat khususnya pada sektor-sektor usaha yang lebih produktif dan prospektif sehingga visi BPD dalam mewujudkan komitmen untuk menjadi *regional champion* dapat tercapai.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

Untuk agenda penelitian mendatang, penelitian perlu dilakukan dengan periode yang lebih panjang dan menambah variabel penelitian seperti CAR, ROA, suku bunga kredit perbankan, GDP, dan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar. Dengan demikian mampu memberikan gambaran kondisi penyaluran kredit Bank Umum secara lebih luas.

5.4 Implikasi Manajerial

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan faktor yang mendukung penyaluran kredit perbankan. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun maka semakin besar pula jumlah kredit yang disalurkan. Oleh karena itu Bank harus melakukan penghimpunan DPK secara optimal. Bank BPD yang bersifat *captive market* harus tetap mengembangkan *Bank Marketing Concept* sehingga dana Pemda berfungsi sebagai *buffer* dan lebih menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya di BPD serta mampu bersaing dengan bank umum lain yang mempunyai jaringan lebih luas.
2. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan faktor yang mendukung penyaluran kredit perbankan. Semakin rendah NPL maka semakin besar jumlah kredit yang disalurkan. Dengan fokus BPD kepada kredit produktif maka dapat membantu memperbaiki sistem pembangunan daerah melalui pembiayaan di sektor riil.

3. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan faktor yang mendukung penyaluran kredit perbankan. LDR tersebut dapat menilai seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Berarti tidak menutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini disebabkan karena jumlah yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.
4. Inflasi merupakan faktor yang mempengaruhi posisi kredit dari sisi permintaan. Pengaruhnya terhadap kredit yaitu jika inflasi tinggi maka akan menyebabkan penurunan permintaan kredit perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Arthesa dan Edia, Handiman (2009), *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Arma, Billy Pratama (2010), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009), Universitas Diponegoro, Tesis.
- Asbanda, (www.asbanda.com)
- Chaikal, Nuryakin dan Perry Warjiyo (2006), Perilaku Penawaran Kredit Bank di Indonesia Kasus Pasar Oligopoli Periode Januari 2001-Juli 2005, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Oktober, 22 – 55.
- Duwi, Priyatno (2010), *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Gerry, Danistyio (2009), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Kredit UMKM di Indonesia, Universitas Diponegoro, Skripsi.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2009), *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Imam, Ghozali (2009), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irma, Anindita (2011), Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, CAR, NPL, dan LDR terhadap Penyaluran Kredit UMKM (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Periode 2003-2010), Universitas Diponegoro, Skripsi.
- Kasmir (2007), *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kompas. (2011), *Minat Berwirausaha Masih Rendah* : Jakarta.
- Luh Gede, Meydianawathi (2007), Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006), *Buletin Studi Ekonomi* Volume 12, Nomor 2, 134 – 147.
- M. Faisal, Abdullah (2005), *Manajemen Perbankan*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mudrajad, Kuncoro dan Suhardjono (2002), *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPF.
- Neni, Sri Imaniyati (2010), *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tanggal 18 Oktober 2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 tanggal 3 Maret 2011

Perry, Warjiyo (2004), *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.

Sugiyono (2007), *Statistik untuk Penelitian*, Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).

Sulistiyandari (2009), Kontrak Internet Banking (Bagian I), tersedia di www.gagasanhukum.wordpress.com (6 Juli 2009).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/BKt tanggal 17 Mei 2001.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.

Wikipedia, (www.google.com).

www.bi.go.id

www.depkop.go.id

STIE BPD Jateng

LAMPIRAN

STIE BPD Jateng

DATA PENELITIAN

WAKTU AMATAN	Y	DPK	NPL	LDR	INFLASI	RES_1
1	1,290,326	11,612,610	3,25	38,94	11,06	-165156,2
2	1,788,691	7,650,628	2,38	83,64	11,06	16158,823
3	740,512	5,803,035	16,12	85,74	11,06	-182816
4	774,927	11,654,851	4,75	42,01	11,06	-671125,9
5	12,081	1,162,691	27,4	90,05	11,06	153590,55
6	71,156	1,322,000	12,67	97,87	11,06	-636890,9
7	203,967	7,063,397	17,16	46,45	11,06	-133265,2
8	230,539	1,562,781	3,73	80,8	11,06	-621002,8
9	1,199,075	20,668,898	5,76	79,35	11,06	-2064273
10	765,267	10,707,484	1,33	91	11,06	-1593515
11	230,914	2,186,756	3,97	75,16	11,06	-590986,6
12	5,777,197	13,847,492	0,57	53,59	11,06	3637538
13	624,566	5,089,178	2,89	89,34	11,06	-886816,1
14	494,297	1,315,553	10,3	127,1	11,06	-847797,6
15	734,399	2,277,288	2,26	102,11	11,06	-662681,9
16	340,764	13,222,119	3,99	33,68	11,06	-1199170
17	83,798	1,919,309	4,99	50,71	11,06	-216540,4
18	277,686	3,247,966	4,66	54,06	11,06	-274268
19	124,346	2,047,604	6,73	79,32	11,06	-624758,1
20	103,491	811,786	28,06	62,38	11,06	818549,3
21	19,135	837,397	30,43	90,67	11,06	334211,96
22	74,958	1,464,419	17,02	69,55	11,06	59124,177
23	402,519	7,046,866	3,71	28,58	11,06	-240466,6
24	1,755,710	11,250,314	4,32	56,81	2,78	-255704,5
25	2,093,752	8,724,509	3,78	96,08	2,78	-312295,4
26	631,043	6,943,530	16,26	84,74	2,78	-752483,9
27	1,084,171	8,535,693	4,02	78,84	2,78	-976474,7
28	11,003	1,454,669	34,52	78,58	2,78	318660,96
29	79,002	1,265,785	20,25	95,09	2,78	-551084,3
30	244,965	7,302,917	13,95	71,19	2,78	-1051139
31	177,562	1,637,118	3,63	78,57	2,78	-982007,6
32	2,080,611	26,037,457	5,02	75,13	2,78	-2186767
33	670,407	12,786,531	1,96	83,6	2,78	-2135323
34	273,475	2,870,615	4,08	67,79	2,78	-835264,4
35	7,989,394	14,641,318	0,59	69,1	2,78	5133814,2

36	899,913	5,377,482	2,36	103,26	2,78	-1257563
37	411,626	1,452,639	15,08	113,97	2,78	-823347,8
38	871,871	2,706,723	2,95	103,13	2,78	-901679,9
39	738,848	10,736,966	2,01	67,81	2,78	-1509704
40	22,176	1,669,066	16,09	85	2,78	-674788
41	239,743	3,542,862	5,81	67,69	2,78	-875486,4
42	77,803	2,787,368	7,85	80,29	2,78	-1067921
43	75,614	607,548	41,51	85,23	2,78	702893,61
44	15,867	1,233,056	29,09	70,16	2,78	250197,82
45	102,119	1,595,325	14,54	87,71	2,78	-706085,7
46	714,315	7,681,946	3,52	36,45	2,78	-496354,1
47	1,805,838	9,400,019	25,57	84,33	6,96	707370,86
48	2,774,227	10,512,515	10,69	92,84	6,96	680469,86
49	6,668,814	8,272,004	2,34	83,65	6,96	4646731
50	930,192	9,338,036	5,58	77,74	6,96	-975841,8
51	18,049	1,566,689	20,92	84,09	6,96	-255004,4
52	33,251	1,158,058	44,24	89,88	6,96	800075,7
53	1,191,443	9,234,069	5,25	71,36	6,96	-601816,7
54	199,193	1,705,757	3,28	84,14	6,96	-917355,8
55	4,133,801	31,018,168	7,55	71,08	6,96	-434617
56	1,078,373	15,767,121	4,01	74,64	6,96	-1697643
57	648,442	3,143,008	3,72	71,87	6,96	-418033,2
58	5,933,624	16,122,319	1,24	72,15	6,96	3025758
59	6,098,484	6,709,011	0,58	93,3	6,96	4028306,9
60	2,073,907	1,950,657	2,8	106,32	6,96	504721,47
61	2,954,311	3,132,756	2,07	94,3	6,96	1409874,2
62	1,469,726	11,092,385	11,48	84,24	6,96	-509766
63	58,348	1,939,925	24,89	89,21	6,96	-170512,3
64	684,869	3,615,423	3,46	74,85	6,96	-509815,2
65	684,196	2,900,559	2,35	104,96	6,96	-1007542
66	81,473	635,043	37,89	85,44	6,96	700567,79
67	6,043	972,582	20,12	22,35	6,96	881530,3
68	1,557,030	1,647,939	3,89	102,65	6,96	144711,15
69	2,713,890	8,586,688	1,32	45,84	6,96	1280472,9
70	1,498,235	9,139,922	19,79	97,98	3,79	-208262,4
71	3,977,497	15,129,514	5,82	78,56	3,79	1172592,2
72	8,808,350	9,812,637	2,37	93,88	3,79	6272317,8
73	1,049,352	12,849,882	6,56	67,64	3,79	-1222972
74	37,107	2,427,618	11,12	66,56	3,79	-621255

75	13,355	1,756,877	37,92	75,14	3,79	542173,68
76	1,528,588	10,911,372	3,28	76,17	3,79	-792984,9
77	97,433	2,438,997	6,49	80,22	3,79	-1023718
78	4,604,621	37,008,489	4,17	72,66	3,79	-1071786
79	1,548,455	19,312,397	7,7	64,13	3,79	-1464316
80	876,64	3,578,989	3,07	81,26	3,79	-574061,9
81	5,948,163	19,934,930	2,35	80,94	3,79	2301463
82	2,122,347	8,787,117	1,52	82,78	3,79	-118405,3
83	2,718,236	2,625,941	2,12	103,51	3,79	950479,71
84	3,812,801	4,097,083	1,18	93,06	3,79	1993512,9
85	2,897,194	18,663,789	7,8	61,78	3,79	17214,564
86	70,584	2,897,037	9,24	68,74	3,79	-776932,3
87	924,733	5,381,305	1,89	62,62	3,79	-485744,5
88	1,860,563	3,694,223	1,86	99,78	3,79	5939,687
89	82,783	732,337	32,09	77,27	3,79	436829,79
90	24,775	1,479,341	19,87	81,7	3,79	-370575,5
91	1,945,197	2,422,433	2,33	82,56	3,79	589918,62
92	3,590,653	10,871,734	1,03	48,01	3,79	1674196,1

STIE BPD

ANALISIS DESKRIPTIF

Hasil Analisis Deskriptif

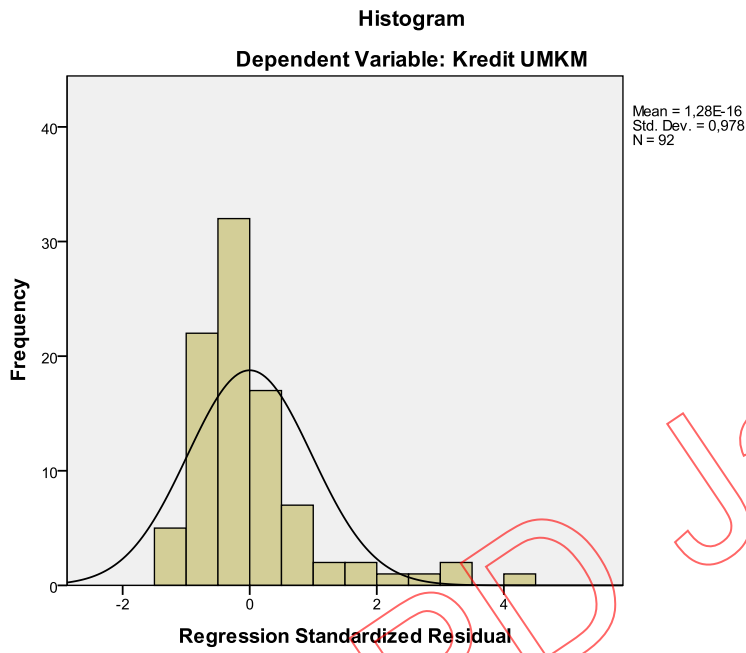
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	92	607,548	37,008,489	6,997,154.78	6,889,014.923
NPL	92	,57	44,24	9,8275	10,60166
LDR	92	22,35	127,10	77,6793	18,87267
Inflasi	92	2,78	11,06	6,1475	3,24611
Valid N (listwise)	92				

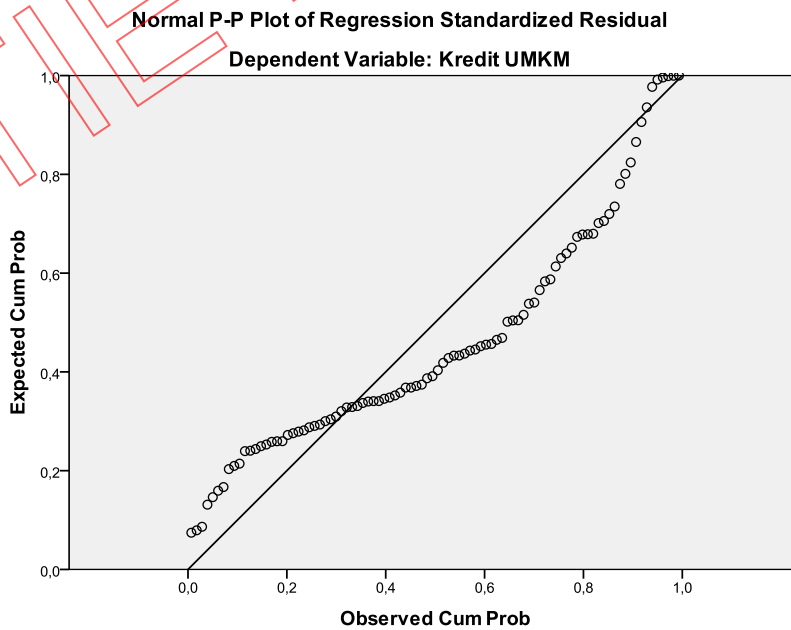
STIE BPD Jateng

UJI NORMALITAS

Grafik Distribusi Normal Variabel Pengganggu



Grafik Normal Plot



Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1480842,02439
Most Extreme Differences	Absolute	,763
	Positive	,173
	Negative	-,126
Kolmogorov-Smirnov Z		1,661
Asymp. Sig. (2-tailed)		,008

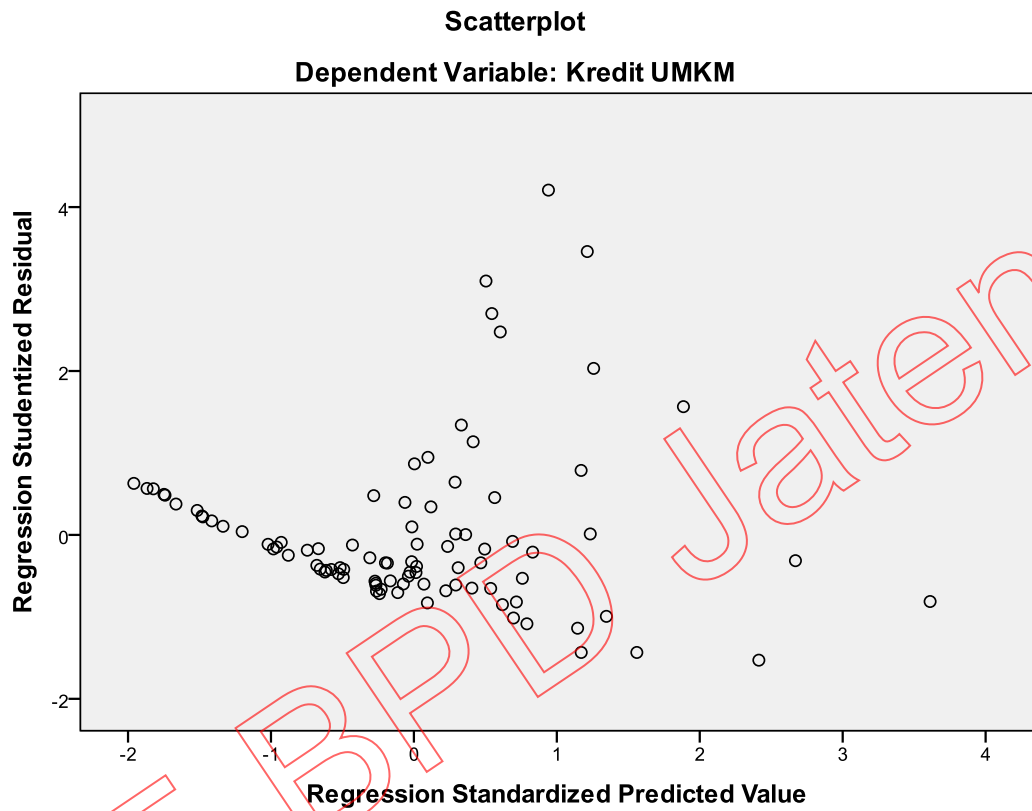
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

STIE BPD Jateng

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Hasil Uji Heterokedastisitas



UJI MULTIKOLINEARITAS

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-184846,194	907681,486		-,204	,839		
DPK	,133	,026	,483	5,157	,000	,804	1,244
NPL	-46721,333	16091,211	-,262	-2,904	,005	,866	1,155
LDR	17932,696	8824,772	,179	2,032	,045	,909	1,100
Inflasi	-40276,778	49886,448	-,069	-,807	,422	,961	1,040

a. Dependent Variable: Kredit UMKM

HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,622 ^a	,387	,359	1,514,501.823	1,713

a. Predictors: (Constant), Inflasi, NPL, LDR, DPK

b. Dependent Variable: Kredit UMKM

STIE BPD Jateng

REGRESI

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Inflasi, NPL, LDR, DPK	.	Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: Kredit UMKM

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,622 ^a	,387	,359	1,514,501.823	1,713

- a. Predictors: (Constant), Inflasi, NPL, LDR, DPK
 b. Dependent Variable: Kredit UMKM

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,259E14	4	3,147E13	13,718	,000 ^a
	Residual	1,996E14	87	2,294E12		
	Total	3,254E14	91			

- a. Predictors: (Constant), Inflasi, NPL, LDR, DPK
 b. Dependent Variable: Kredit UMKM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-184846,194	907681,486		-,204	,839		
	DPK	,133	,026	,483	5,157	,000	,804	1,244
	NPL	-46721,333	16091,211	-,262	-2,904	,005	,866	1,155
	LDR	17932,696	8824,772	,179	2,032	,045	,909	1,100
	Inflasi	-40276,778	49886,448	-,069	-,807	,422	,961	1,040

a. Dependent Variable: Kredit UMKM

Coefficient Correlations^a

Model			Inflasi	NPL	LDR	DPK
1	Correlations	Inflasi	1,000	,053	,170	,138
		NPL	,053	1,000	,011	,356
		LDR	,170	,011	1,000	,256
		DPK	,138	,356	,256	1,000
	Covariances	Inflasi	2,489E9	42572321,472	74976966,885	176,832
		NPL	42572321,472	2,589E8	1578381,922	147,290
		LDR	74976966,885	1578381,922	77876602,985	57,958
		DPK	176,832	147,290	57,958	,001

a. Dependent Variable: Kredit UMKM

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	DPK	NPL	LDR	Inflasi
1	1	3,825	1,000	,00	,01	,02	,00	,01
	2	,700	2,338	,00	,28	,33	,00	,00
	3	,301	3,566	,00	,41	,46	,00	,24
	4	,155	4,974	,02	,10	,15	,13	,57
	5	,020	13,971	,98	,20	,04	,87	,18

a. Dependent Variable: Kredit UMKM

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-875,487.31	5,676,407.00	1,428,921.60	1,176,066.669	92
Std. Predicted Value	-1,959	3,612	,000	1,000	92
Standard Error of Predicted Value	179831,813	744697,813	339029,126	99118,643	92
Adjusted Predicted Value	-1,022,163.81	6,018,177.00	1,434,286.43	1,207,790.216	92
Residual	-2,186,767.250	6,272,318.000	2.050E-10	1,480,842.024	92
Std. Residual	-1,444	4,142	,000	,978	92
Stud. Residual	-1,528	4,207	-,002	1,000	92
Deleted Residual	-2,450,189.250	6,472,624.500	-5,364.831	1,548,450.227	92
Stud. Deleted Residual	-1,540	4,687	,011	1,044	92
Mahal. Distance	,294	21,013	3,957	3,246	92
Cook's Distance	,000	,113	,009	,020	92
Centered Leverage Value	,003	,231	,043	,036	92

a. Dependent Variable: Kredit UMKM

CURICULUM VITAE

Nama : Dara Puspita Nadya Putri
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat /Tgl lahir : Purwodadi, 5 September 1989
Status : Belum menikah
Agama : Islam
Suku Bangsa : Jawa
Negara : Republik Indonesia
Tinggi/berat : 158/56
Alamat : Jl. Gajahmada 18 (PERUMDA) RT 02 RW 20
Purwodadi-Grobogan 58111

PENDIDIKAN FORMAL

1995 – 2001 = SDN 12 Purwodadi
2001 – 2004 = SMPN 2 Purwodadi
2004 – 2007 = SMA Kristen Widya Wacana Purwodadi
2007 – 2012 = STIE Bank BPD Jateng